

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan tupoksi yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Dilingkungan Pemerintahan serta Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Pencapaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disisi lain, LAKIP ini dapat menjadi cermin pembanding bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama tahun 2019, sekaligus sebagai alat pemacu untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya agar lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun pelaksanaannya.

Padang, Januari 2020
Kepala Dinas

Ir. Fathol Bari, M.Sc.Eng
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640515 199003 1 010

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2019 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019. Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya Tujuan dan Sasaran, serta Visi dan Misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021. Visi tersebut yakni sebagai **"Mewujudkan Infrastruktur yang handal, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan"**, yang merupakan bagian dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi pendanaan melalui APBD sebesar **Rp. 479.186.523.089,-** dengan Realisasi sebesar **Rp. 395.100.652.064.66,- (82,45%)** yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan 16 (enam belas) program, 167 (seratus enam puluh tujuh) kegiatan di APBD-P dan paket kegiatan lebih kurang sebanyak 307 (swakelola, penyedia). Target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada tahun 2019 sebesar **Rp. 1.025.0000.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.348.840.842,- (131,59 %)**.

Tabel Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No.	Restribusi	Anggaran	Realisasi	%
1.	Laboratorium	275.000.000,00	481.316.842,00	175,02
2.	Alat-Alat Berat	750.000.000,00	867.524.000,00	115,67
	Jumlah	1.025.000.000,00	1.348.840.842,00	131,59

Dana APBD SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 sebesar :

**Tabel Pagu Dana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Sumatera Barat**

No.	Uraian	Rencana	Realisasi	Sisa	%
1.	Belanja Tidak Langsung	32.036.807.519,00	31.617.025.707,00	419.781.812,00	98,69
2.	Belanja Langsung	479.186.523.089,00	395.100.652.064,66	84.085.871.024,34	82,45
	Jumlah	511.223.330.608,00	426.717.677.771,66	84.505.652.836,34	83,47

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2019 terdapat 16 (enam belas) program terdiri dari 11 (sebelas) program strategis dan 5 program pendukung. *Out put* dan *out come* dari program-program strategis tersebut mempunyai korelasi/keterkaitan langsung dengan indikator kinerja pemerintah Provinsi.

Dari hasil *evaluasi capaian kinerja keuangan* terhadap 16 (enam belas) program , diketahui bahwa terdapat 12 (dua belas) program yang berkinerja sangat baik dan 4 (empat) program yang berkinerja baik.

Rekapitulasi Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PUPR Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	<i>Tim evaluator</i>
	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Persentase Jalan Mantap	73%	73,015 %
2	Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	3 unit	3 unit
		Persentase cakupan air minum	80%	78,65%
		Persentase cakupan sanitasi	78%	79,78%
3	Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi	83%	84%

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Lampiran.....	v
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Organisasi.....	1
1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi.....	2
1.1.2 Tugas Pokok Organisasi.....	2
1.1.3 Struktur Organisasi.....	18
1.1.4 Sumber Daya Manusia.....	18
1.2 Aspek Strategis Organisasi.....	23
1.3 Permasalahan Utama (<i>Strategic Issues</i>) yang dihadapi Organisasi.....	24
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA.....	26
2.1 Peran Strategis.....	26
2.2 Perencanaan & Perjanjian Kinerja.....	33
2.2.1 Sasaran Strategis.....	37
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA.....	40
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja.....	40
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja.....	40
3.2.1 Hasil Nilai Akuntabilitas Kinerja.....	40
3.2.2 Hasil Kinerja Indikator Persentase Jalan Mantap.....	41
3.2.3 Hasil Kinerja Indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Tata Pemerintahan.....	49
3.2.4 Hasil Kinerja Indikator Persentase Cakupan Air Minum.....	50
3.2.5 Hasil Kinerja Indikator Persentase Rumah Tangga Bersanitasi.....	53
3.2.6 Hasil Kinerja Indikator Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang.....	55
3.3 Capaian Kinerja Organisasi.....	55
3.3.1 Capaian Kinerja Indikator Persentase Jalan Mantap.....	56
3.3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019.....	56
3.3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian dengan Tahun Lalu.....	56
3.3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d tahun 2019 terhadap Renstra.....	56
3.3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Standar Nasional.....	57
3.3.1.5 Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja Persentase Jalan Mantap.....	57

3.3.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Program/Kegiatan Penunjang)	58
3.3.1.7 Realisasi Anggaran.....	59
3.3.2 Capaian Kinerja Indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Tata Pemerintahan.....	67
3.3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019.....	67
3.3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja& Capaian dengan Tahun Lalu.....	67
3.3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d tahun 2019 terhadap Renstra.....	68
3.3.2.4 Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Tata Pemerintahan.....	68
3.3.2.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Program/Kegiatan Penunjang)	69
3.3.2.6 Realisasi Anggaran.....	69
3.3.3 Capaian Kinerja Indikator Persentase Cakupan Air Minum.....	72
3.3.3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019.....	72
3.3.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja& Capaian dengan Tahun Lalu.....	72
3.3.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d tahun 2019 terhadap Renstra.....	72
3.3.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Standar Nasional.....	73
3.3.3.5 Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja Persentase Cakupan Air Minum	74
3.3.3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Program/Kegiatan Penunjang)	74
3.3.3.7 Realisasi Anggaran.....	74
3.3.4 Capaian Kinerja Indikator Persentase Rumah Tangga Bersanitasi.....	76
3.3.4.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019.....	76
3.3.4.2 Perbandingan Realisasi Kinerja& Capaian dengan Tahun Lalu.....	76
3.3.4.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d tahun 2019 terhadap Renstra.....	77
3.3.4.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Standar Nasional.....	77
3.3.4.5 Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja Persentase Rumah Tangga Bersanitasi.....	78
3.3.4.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Program/Kegiatan Penunjang)	78
3.3.4.7 Realisasi Anggaran.....	79
3.3.5 Capaian Kinerja Indikator Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang.....	81
3.3.5.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019.....	81
3.3.5.2 Perbandingan Realisasi Kinerja& Capaian dengan Tahun Lalu.....	84
3.3.5.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d tahun 2019 terhadap Renstra.....	85
3.3.5.4 Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang.....	85
3.3.5.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Program/Kegiatan Penunjang)	86
3.3.5.6 Realisasi Anggaran.....	86

BAB 4. PENUTUP..... 114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas PUPR tahun 2019.....	20
Gambar 1.2 Proporsi Pegawai Dinas PUPR berdasarkan kelamin Tahun 2019.....	21
Gambar 1.3 Grafik Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019.....	21
Gambar 1.4 Grafik Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Golongan Tahun 2019.....	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Jenis . Kelamin.....	19
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan tingkat pendidikan.....	21
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan pangkat/golongan.....	22
Tabel 2.1	Peran Strategis Dinas PUPR dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.....	27
Tabel 2.2	Tabel Penyesuaian Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.....	30
Tabel 2.3	Indikator Kinerja & Target Capaian Dinas PUPR sesuai RPJMD 2016-2021.....	32
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019.....	34
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Awal Kepala Dinas PUPR tahun 2019.....	34
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas PUPR tahun 2019.....	36
Tabel 2.7	Strategi dan Kebijakan Sasaran 1.....	38
Tabel 2.8	Strategi dan Kebijakan Sasaran 2.....	38
Tabel 2.9	Strategi dan Kebijakan Sasaran 3.....	39
Tabel 2.10	Strategi dan Kebijakan Sasaran 4.....	39
Tabel 3.1	Pengukuran Target Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.....	41
Tabel 3.2	Pengukuran Target Kinerja Kemantapan Jalan Dinas PUPR	41
Tabel 3.3	Pengukuran Target Kinerja Pemerintah Provinsi Sumbar Jumlah Ruas Jalan yang terkoneksi dengan Kondisi Jalan Mantap.....	42
Tabel 3.4	Rekapitulasi Kondisi Jalan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.....	43
Tabel 3.5	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Barat Per Ruas Tahun 2019.....	43
Tabel 3.6	Target dan Capaian Indikator Sarana dan Prasarana Penunjang Tata Pemerintahan.....	49
Tabel 3.7	Target dan Capaian Indikator Persentase Cakupan	50
Tabel 3.8	Rekapitulasi Analisa Data Cakupan Akses Penyediaan Layanan Air Minum dan <i>Daerah Rawan Air Per kab/kota di Sumatera Barat sampai tahun 2019</i>	51
Tabel 3.9	Target dan Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga	53
Tabel 3.10	Laporan Kemajuan Akses Jamban Provinsi Sumatera Barat Desember 2019.....	54
Tabel 3.11	Capaian Indikator Kinerja.....	55
Tabel 3.12	Klasifikasi Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019.....	55
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Indikator Persentase Jalan Mantap.....	56
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja&Capaian Jalan Mantap tahun 2017,2018&2019	56
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d 2019 Terhadap Renstra.....	57
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Persentase Jalan Mantap Dengan standar Nasional	57

Tabel 3.17	Program / Kegiatan Pendukung Capaian Persentase Kemantapan Jalan Provinsi	59
Tabel 3.19	Perbandingan Realisasi Kinerja&Capaian Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Tata Pemerintahan tahun 2017,2018&2019.....	67
Tabel 3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d 2019 Terhadap Renstra.....	68
Tabel3.21	Program / Kegiatan Pendukung Sarana dan Prasarana Penunjang Tata Pemerintahan.....	70
Tabel 3.22	Capaian Kinerja Indikator Persentase Cakupan Air Minum di Sumatera Barat..	72
Tabel 3.23	Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian Cakupan Layanan Air Minum tahun 2017,2018&2019.....	72
Tabel 3.24	Program/Kegiatan Pendukung Capaian Cakupan Air Minum.....	75
Tabel 3.25	Target dan Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga	76
Tabel 3.26	<i>Realisasi Kinerja & Capaian Persentase Sanitasi tahun 2017, 2018 & 2019...</i>	76
Tabel 3.27	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d 2019 Terhadap Renstra.....	77
Tabel 3.28	Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (tahun 2019).....	77
Tabel 3.29	Perbandingan antara Realisasi dengan Standar Nasional (dalam kurun RPJMN 2015-2019).....	77
Tabel 3.30	Program/Kegiatan Pendukung Capaian Cakupan Sanitasi.....	80
Tabel 3.31	Capaian Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang.....	81
Tabel 3.32	Capaian Kinerja Indikator kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang.....	84
Tabel 3.33	Perbandingan Realisasi Kinerja&Capaian kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang tahun 2017,2018&2019.....	84
Tabel 3.34	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d 2019 Terhadap Renstra.....	85
Tabel 3.35	Program/Kegiatan Pendukung Capaian Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang.....	87
Tabel 3.36	Penilaian Kinerja Program/Kegiatan Dinas PUPR Tahun 2019.....	88
Tabel 3.37	Paket Lewat Tahun Anggaran 2019.....	106
Tabel 3.38	Rekapitulasi Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PUPR Tahun 2019.....	113

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Perjanjian Kinerja Eselon II (awal)
- Lampiran II : Perjanjian Kinerja Eselon II (perubahan)
- Lampiran III : Perjanjian Kinerja Eselon III
- Lampiran IV : Perjanjian Kinerja Eselon IV
- Lampiran V : Perjanjian Kinerja staf (jilid tersendiri)
- Lampiran VI : Indikator Kinerja Utama(IKU) Eselon II
- Lampiran VII : Rencana Kinerja Tahunan (2019)
- Lampiran VIII : Rencana Aksi Eselon II
- Lampiran IX : Rencana Aksi Eselon III dan IV
- Lampiran X : Realisasi Rencana Aksi Eselon II (Triwulan I-IV)
- Lampiran XI : Realisasi Rencana Aksi Eselon III & IV
- Lampiran XII : Rekapitulasi Realisasi Fisik & Keuangan Kegiatan Tahun 2019
- Lampiran XIII : Cascading Dinas PUPR
- Lampiran XIV : Data dukung Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantapan Jalan
- Lampiran XV : Data Dukung Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Cakupan Air Minum
- Lampiran XVI : Data Dukung Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Cakupan Sanitasi
- Lampiran XVII : Revisi Renstra (jilid tersendiri)
- Lampiran XVIII : SK Lakip tahun 2019

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah berupaya mewujudkan tujuan nasional dan daerah. Dalam tataran nasional, pemerintah memiliki visi yaitu terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Sementara sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Barat, pemerintah memiliki visi yaitu Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau yang selanjutnya disingkat dengan Dinas PUPR dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas PUPR sendiri memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Dilingkungan Pemerintahan serta Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Sebagai perwujudannya perlu disampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah yang ada di suatu wilayah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016. Laporan ini memuat analisis kinerja dan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera

Barat yaitu sebanyak 16 program dan 167 kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2019.

Tata cara penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Perda (Peraturan Daerah) Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat awalnya merupakan bagian dari Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman (Prasjal Tarkim). Setelah Perda Nomor 8 tahun 2016 diterbitkan maka Dinas Prasjal Tarkim dipecah menjadi 2 (dua) dinas yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan). Berdasarkan Perda tersebut

1.1.2 Tugas Pokok Organisasi

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Nomor 53 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 104 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) diketahui bahwa Dinas PUPR merupakan dinas daerah tipe B yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
5. Pelaksanaan tugas di bidang Keciaptakaryaan, Pelaksanaan Jalan serta bidang Penataan Ruang.

6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Keciptakarya, Pelaksanaan Jalan serta Bidang Penataan Ruang.
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki susunan organisasi dinas dengan fungsinya masing-masing.

1. Kepala Dinas

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
- c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan di Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- e. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis di Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretaris

Sekretaris memimpin bagian sekretariat. Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Uraian tugas pokok dan fungsi sekretariat meliputi :

- a. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumah tanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan bidang Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas.

Uraian tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- c. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;

- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- f. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
- i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2. Sub Bagian Keuangan dan Program

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Keuangan dan Program.

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang dan Program;
- b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan bidang keuangan dan program di lingkungan Dinas.

Uraian tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan dan Program meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Keuangan dan Program;
- b. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi ;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang ;
- h. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- j. menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- k. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan, Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Bidang Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Teknis dan Leger Jalan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Bina Marga meliputi :

- a. menyelenggarakan program kerja dan pengkajian bahan kebijakan teknis perencanaan teknis dan leger jalan, pembangunan jalan dan jembatan, serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan, Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. menyelenggarakan pembinaan pengelolaan administrasi perencanaan teknis dan leger jalan, pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis operasional, bantuan teknis perencanaan, rekomendasi pemberian izin utilitas pada badan jalan dan manfaat jalan serta jembatan;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan/pengendalian kegiatan pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi;
- g. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi mengenai perencanaan teknis dan leger jalan, pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- h. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan ke-Bina Marga-an di kabupaten/kota;
- i. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi Bidang ke-Bina Marga-an.

- j. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan perencanaan teknis dan leger, pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.1. Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan

Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Perencanaan Teknis dan Leger Jalan.

Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Teknis dan Leger Jalan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Teknis dan Leger Jalan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Teknis dan Leger Jalan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan teknis&leger jalan;
- b. melaksanakan penyusunan program-program, mengolah, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan kegiatan pemutakhiran database jalan, drainase dan penahan badan jalan;
- c. melaksanakan survey pendataan dan analisa dan evaluasi tentang status fungsi peta jalan serta jembatan;
- d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan ke-Bina Marga-an;
- e. melaksanakan kebijakan di Bidang Perencanaan Teknis dan Leger Jalan;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan/pengendalian kegiatan pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi;
- g. melaksanakan bantuan teknis perencanaan;
- h. melaksanakan pemberian rekomendasi teknis terhadap izin pemasangan fasilitas umum (utilitas) pada badan jalan dan manfaat badan jalan jembatan;
- i. melaksanakan pengelolaan data, pelaporan dan evaluasi Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembangunan jalan dan jembatan;
- b. melaksanakan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan peningkatan sarana jalan dan jembatan;
- c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan ke-Bina Marga-an;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja konstruksi prasarana dan sarana jalan dan jembatan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan; melakukan survey, analisis struktur jalan dan jembatan, penelitian, melakukan rencana dan gambar mengenai geometri jalan, jembatan, dinding penahan dan drainase;
- h. melaksanakan penyusunan spesifikasi teknis dan estimasi biaya terhadap pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, drainase dan dinding penahan jalan;
- i. melaksanakan pengelolaan data, pelaporan dan evaluasi pada Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pemeliharaan Jalan & Jembatan meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pemeliharaan jalan & jembatan;
- b. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan ke-Bina Marga-an;
- c. melaksanakan kebijakan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan pengelolaan data pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan pembinaan, pengawasan/pengendalian pemeliharaan dan jembatan;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemasangan fasilitas umum (utilitas) pada badan jalan dan daerah milik jalan;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pemeliharaan jalan dan jembatan;
- i. melaksanakan survey, analisis struktur jalan dan jembatan, penelitian, melakukan rencana pemeliharaan jalan dan jembatan;
- j. melaksanakan penyusunan spesifikasi teknis dan estimasi biaya terhadap pemeliharaan jalan, jembatan, drainase dan dinding penahan jalan serta daerah milik jalan;
- k. melaksanakan pelaporan dan evaluasi Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas, Penyehatan Lingkungan serta Air Minum dan Limbah.

Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyehatan Lingkungan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Air Minum dan Limbah.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Cipta Karya meliputi :

- a. menyelenggarakan program kerja dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Cipta Karya;
- b. menyelenggarakan fasilitasi keciptakaryaan;
- c. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan keciptakaryaan;
- d. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis provinsi;
- e. menyelenggarakan fasilitasi dan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
- f. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;
- g. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan keciptakaryaan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.1. Seksi Penyehatan Lingkungan

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Penyehatan Lingkungan.

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Penyehatan Lingkungan;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Penyehatan Lingkungan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyehatan Lingkungan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Penyehatan Lingkungan meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyehatan lingkungan;
- b. melaksanakan pengelolaan data penyehatan lingkungan;
- c. melaksanakan fasilitasi terhadap kabupaten/kota dalam upaya pengembangan sistem sanitasi;
- d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi Program Penyehatan Lingkungan;
- e. melaksanakan pengembangan infrastruktur Seksi Penyehatan Lingkungan;
- f. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan infrastruktur penyehatan lingkungan pada permukiman di kawasan strategis provinsi;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur Seksi Penyehatan Lingkungan;
- h. menyusun dan menyiapkan laporan Seksi Penyehatan Lingkungan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyehatan lingkungan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.2. Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Negara

Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas.

Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan pembangunan gedung dan rumah dinas;
- b. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan gedung dan rumah dinas;
- c. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan gedung dan rumah dinas;
- d. melaksanakan penyelenggaraan pembangunan gedung dan rumah dinas;
- e. melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi.
- f. melaksanakan fasilitasi dan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
- g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pembangunan gedung dan rumah dinas;
- h. melaksanakan pengembangan jejaring kemitraan dalam Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas;
- j. melaksanakan bantuan teknis terhadap Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan gedung dan rumah dinas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.3. Seksi Air Minum dan Limbah

Seksi Air Minum dan Limbah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Air Minum dan Limbah.

Seksi Air Minum dan Limbah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Air Minum dan Limbah;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Air Minum dan Limbah; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Air Minum dan Limbah.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Air Minum dan Limbah meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis air minum dan limbah hasil pengelolaan air minum;
- b. melaksanakan pengelolaan data pada seksi air minum dan limbah hasil pengolahan air minum;
- c. melaksanakan fasilitasi terhadap kabupaten/kota dalam upaya pengembangan sistem pada seksi air minum dan limbah hasil pengolahan air minum;
- d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi program seksi Air Minum dan Limbah hasil pengolahan air minum;
- e. melaksanakan pengembangan infrastruktur seksi air minum dan air limbah hasil pengolahan air minum;
- f. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan infrastruktur air minum pada permukiman di kawasan strategis provinsi;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur air minum dan limbah hasil pengolahan air minum;
- h. menyusun dan menyiapkan laporan seksi air minum dan limbah hasil pengolahan air minum; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Perencanaan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang Pengawasan Penataan Ruang.

Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Penataan Ruang;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Penataan Ruang; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Penataan Ruang.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Penataan Ruang meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan penetapan Perdanya;
- b. menyelenggarakan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Peraturan Zonasi serta penetapan Perdanya;
- c. menyelenggarakan penyusunan program dan kegiatan Bidang Penataan Ruang;
- d. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penataan ruang antar kabupaten/kota;
- e. menyelenggarakan pengendalian perencanaan penataan ruang, pembinaan penataan ruang dan pengawasan penataan ruang; dan
- f. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan perencanaan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, dan pengawasan penataan ruang;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.1. Seksi Perencanaan

Seksi Perencanaan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Perencanaan Penataan Ruang.

Seksi Perencanaan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Tata Ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Penataan Ruang; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Penataan Ruang.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Perencanaan Penataan Ruang meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana tata ruang;
- b. melaksanakan penyusunan serta sinkronisasi program pemanfaatan ruang antar daerah;
- c. melaksanakan penyusunan program pengendalian pemanfaatan ruang melalui peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- d. melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi;

- e. melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP);
- f. melaksanakan penyusunan perangkat insentif dan disinsentif tingkat Provinsi;
- g. melaksanakan integrasi RTRW dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K);
- h. melaksanakan penyediaan pusat data dan informasi penataan ruang yang terdiri dari perda, dokumen Penataan ruang dan data spasial;
- i. melaksanakan pelaporan dan evaluasi di bidang Perencanaan penataan Ruang;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.2. Seksi Pembinaan

Seksi Pembinaan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pembinaan Penataan Ruang.

Seksi Pembinaan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Penataan Ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Penataan Ruang; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Penataan Ruang.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pembinaan Penataan Ruang meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan program & kegiatan Seksi Pembinaan Penataan Ruang ;
- b. melaksanakan sosialisasi kebijakan bidang penataan ruang (peraturan perundang-undangan dan pedoman penataan ruang) ;
- c. melaksanakan pemberian advokasi, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan penataan ruang kepada kabupaten/kota ;
- d. melaksanakan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada ;
- e. melaksanakan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat ;
- f. melaksanakan pemberian izin pemanfaatan ruang tingkat Provinsi ;
- g. melaksanakan pembinaan pengembangan system informasi dan komunikasi penataan ruang kepada kabupaten/kota ;
- h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi seksi Pembinaan Penataan Ruang ;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.3. Seksi Pengawasan

Seksi Pengawasan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengawasan Penataan Ruang.

Seksi Pengawasan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengawasan Penataan Ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengawasan Penataan Ruang; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengawasan Penataan Ruang.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pengawasan Penataan Ruang meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan seksi pengawasan penataan ruang
- b. melaksanakan koordinasi dan kebijakan pengawasan penataan ruang;
- c. melaksanakan monitoring kinerja pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang di kabupaten/kota;
- d. melaksanakan monitoring pemenuhan penyediaan peta analog dan peta digital rencana tata ruang di kabupaten/kota;
- e. melaksanakan monitoring pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau sebesar 20 % dari luasan kawasan perkotaan di kabupaten/kota.
- f. melaksanakan pemberian sanksi pelanggaran penataan ruang tingkat provinsi;
- g. melaksanakan operasional penyidik pegawai negeri sipil (ppns) bidang penataan ruang;
- h. melaksanakan evaluasi pemanfaatan ruang tingkat provinsi;
- i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi terkait indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di kabupaten/kota;
- j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi seksi pengawasan penataan ruang;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. UPTD Laboratorium dan Bahan Konstruksi

Susunan organisasi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi terdiri atas :

1. Kepala UPTD
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pengujian Mutu Bahan
4. Seksi Pengujian Mutu Konstruksi
5. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengujian mutu bahan/konstruksi.

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional pengujian bahan/mutu konstruksi.
- b. Pelaksanaan pengelolaan, pengaturan, pemanfaatan, pemakaian alat-alat laboratorium untuk pengujian bahan/mutu konstruksi.
- c. Pelaksanaan operasional layanan pengujian pada masyarakat dan pihak ketiga sesuai dengan bidang pengujian bahan/mutu konstruksi.
- d. Pelaksanaan pemungutan retribusi untuk PAD Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- e. Pelaksanaan operasional tugas kedinasan sesuai dengan bidang pengujian bahan/mutu konstruksi.
- f. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan UPTD.
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. UPTD P2BG

Susunan organisasi UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung terdiri dari :

1. Kepala UPTD
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
4. Seksi Layanan Data dan Informasi
5. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung.

UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung.
- c. Pelaksanaan operasional pelayanan pada masyarakat bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung.
- d. Pelaksanaan teknis administrasi ketatausahaan UPTD.

- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. UPTD Workshop dan Peralatan

Susunan organisasi UPTD Workshop dan Peralatan terdiri :

1. Kepala UPTD
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Peralatan dan Layanan Gangguan
4. Seksi Workshop dan Perbekalan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Workshop dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang penyiapan peralatan, bahan jalan/jembatan, perbengkelan, layanan gangguan dan pembinaan peralatan.

UPTD Workshop dan Peralatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan, pengawasan, pengaturan, pemanfaatan dan pemakaian asset kekayaan daerah berupa peralatan penunjang untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.
- b. Pelaksanaan pemeliharaan dan operasional peralatan.
- c. Pelaksanaan pekerjaan layanan gangguan pada jalan/jembatan akibat bencana alam.
- d. Pelaksanaan pemungutan retribusi atas sewa peralatan untuk PAD.
- e. Pelaksanaan teknis standard administrasi dan operasional peralatan.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI

Susunan organisasi UPTD Jalan Jembatan Wilayah I-VI terdiri dari :

1. Kepala UPTD
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Jalan dan Jembatan I
4. Seksi Jalan dan Jembatan II
5. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program/anggaran kegiatan, pelaksanaan teknis pemeliharaan rutin dan berkala serta pengendalian/evaluasi hasil pemeliharaan teknis jalan dan jembatan.

UPTD Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan program kegiatan dan anggaran pemeliharaan rutin/berkala jalan dan jembatan
- b. Penyelenggaraan penyusunan kerangka acuan kerja, estimasi biaya dan penyiapan dokumen-dokumen teknis pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan.
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan.
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi dengan kabupaten/kota atas pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan.
- e. Pemberian bantuan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan pada masyarakat atau kelompok swadaya masyarakat yang membutuhkan.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum tahun 2019 ditampilkan pada *Gambar 1.1*. Dari struktur organisasi dapat dijelaskan bahwa formasi tenaga struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2019 terdiri dari :

1. Kepala Dinas : Eselon II (1 orang)
2. Sekretaris : Eselon III (1 orang)
3. Kepala Bidang : Eselon III (3 orang)
4. Kepala UPTD : Eselon III (9 orang)
5. Kepala Seksi : Eselon IV (27 orang)
6. Kasubag : Eselon IV (11 orang)

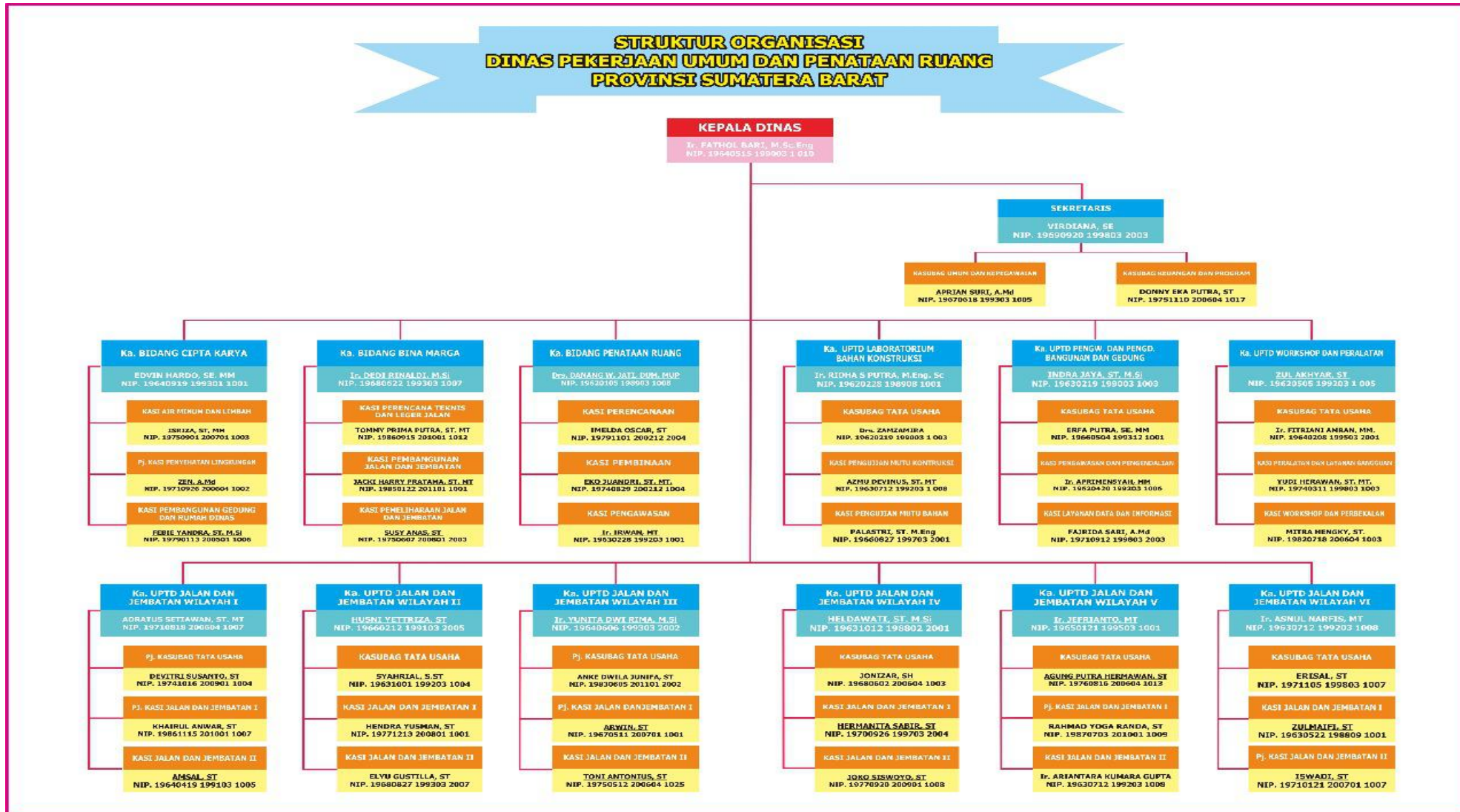
1.1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data akhir tahun 2019 sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan jenis kelamin pemetaan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumbar ditampilkan pada *tabel 1.1*.

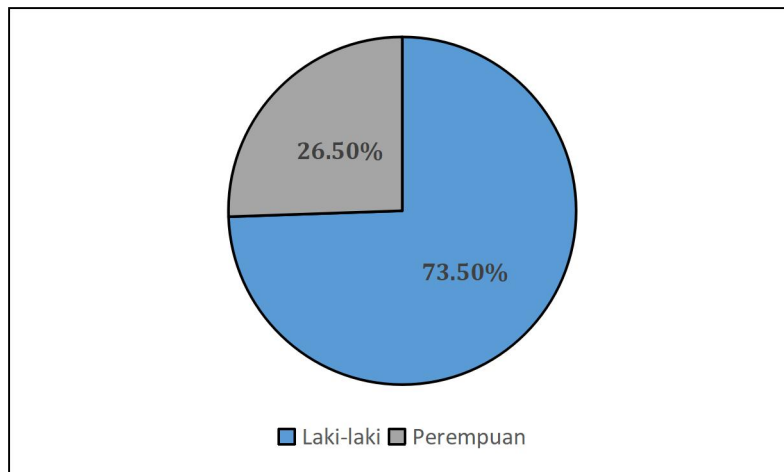
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
Laki-laki	258 orang	73.50%
Perempuan	93 orang	26.50%

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas PUPR



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas PUPR tahun 2019



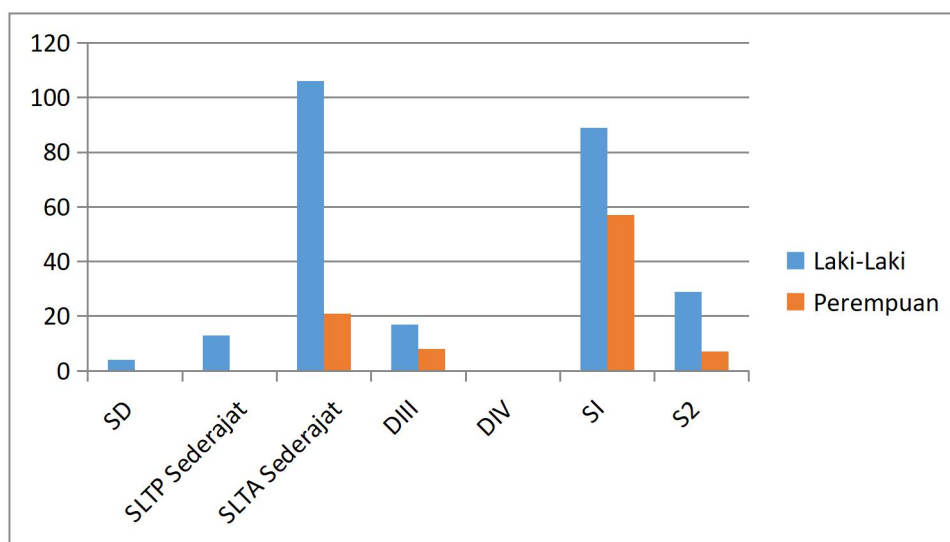
Gambar 1.2 Proporsi Pegawai Dinas PUPR berdasarkan kelamin Tahun 2019

Pemetaan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya ditampilkan pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
SD	4	-	4
SLTP Sederajat	13	-	13
SLTA Sederajat	106	21	127
DIII	17	8	25
DIV	-	-	-
S1	89	57	146
S2	29	7	36
Jumlah	258	93	351

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas PUPR



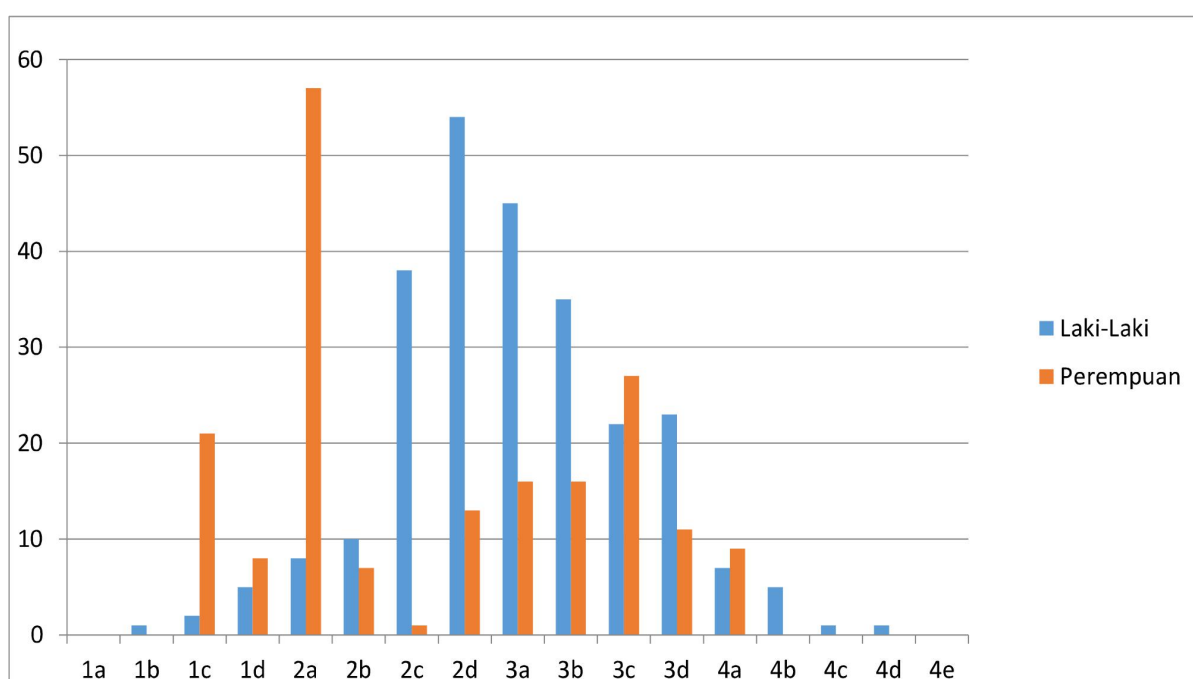
Gambar 1.3 Grafik Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sedangkan, pemetaan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pangkat/golongan ditampilkan pada *tabel 1.3*.

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan pangkat/golongan

Golongan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
1A	-	-	-
1b	1	-	1
1c	2	-	2
1d	5	-	5
2a	8	1	9
2b	10	-	10
2c	38	1	39
2d	54	13	67
3a	45	16	61
3b	35	16	51
3c	22	27	49
3d	23	11	34
4a	7	9	16
4b	5	-	5
4c	1	-	1
4d	1	-	1
4e	-	-	-

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas PUPR



Gambar 1.4 Grafik Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Golongan Tahun 2019

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat yang kemudian berkontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat terutama melalui pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, air minum, air limbah, pembangunan gedung atau bangunan negara serta penataan ruang. Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

Pembangunan jalan dan jembatan dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Hal tersebut dilakukan dengan cara pembangunan dan peningkatan pada jalan yang belum terhubung antar daerah dan terisolir, meningkatkan prasarana perhubungan menuju destinasi wisata dan pelabuhan, serta meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan. Dengan adanya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing wilayah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Pemeliharaan dan rehabilitasi ruas jalan yang ada juga diperlukan untuk mempertahankan kondisi kemnetapan jalan yang ada.

Disamping itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat juga memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan akan akses air minum dan sanitasi yang layak di Provinsi Sumatera Barat. Peran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lainnya adalah pembangunan gedung negara, shelter dan bangunan lainnya dalam rangka rekonstruksi bangunan yang ada di Sumatera Barat. Pembangunan bangunan strategis yang dilakukan pada tahun 2019 yaitu Main Stadium Sumatera Barat, Gedung Kebudayaan, Gedung Bundo Kandung, Gedung Samsat dan Convention Hall.

Penataan Ruang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang sesuai daya dukung lingkungan dan berkelanjutan. Pada Tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat melakukan penyusunan Rencana Tata Ruang pada Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP Mandeh) dan RTR KSP Pasopalapa. Selain itu Dinas PUPUR juga melakukan penyusunan database ke PUan dan Tata Ruang Provinsi, Kabupaten dan Kota serta beberapa rencana tata ruang lainnya.

Adapun program-program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan perwujudan atas misi Gubernur yaitu Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dengan demikian pembangunan infrastruktur yang dilakukan Dinas PUPR dapat mengurangi kesenjangan antar kawasan, meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan pembangunan.

1.3 *Permasalahan Utama (Strategic Issues) yang dihadapi Organisasi*

Pembangunan Sumatera Barat telah mengalami kemajuan dan keberhasilan selama beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang harus ditangani segera melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan. Di bidang infrastruktur, Sumatera Barat menghadapi tantangan untuk terus berbenah menuju infrastruktur yang andal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah salah satu OPD yang terlibat langsung dalam permasalahan infrastruktur yang ada di Sumatera Barat.

Permasalahan utama terkait infrastruktur salah satunya adalah upaya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah masih terkendala. Penyebabnya adalah (1) masih terdapat jalan yang belum terhubung antar wilayah dan terisolir karena faktor pembebasan lahan dan keterbatasan anggaran (2) kemantapan jalan provinsi sebesar 73,015 % dengan deviasi yang cukup jauh jika dibandingkan dengan kemantapan jalan nasional yaitu 92,83 % sehingga perlu upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan yang berkesinambungan agar nilai kemantapan jalan provinsi setidaknya mencapai 75% pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra).

Disamping itu, upaya pemenuhan kebutuhan dasar berupa akses air minum dan sanitasi layak juga masih mengalami berbagai kendala, antara lain (1) masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat (2) perlunya koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pembangunan dan pemeliharaan aset (3) kesulitan penyediaan lahan karena terkendala pembebasannya sesuai dengan kriteria pembangunan infrastruktur dan (4) terbatasnya ketersediaan dana pembangunan.

Hal serupa, dibidang Penataan Ruang terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian, yaitu (1) masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan dan belum terbangunnya kemitraan yang kuat dengan pemangku kepentingan terutama pemanfaatan ruang (2) rendahnya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang, terbatasnya pedoman acuan pemanfaatan ruang dan upaya memasyarakatkannya.

Pembangunan infrastruktur telah menggerakkan ekonomi riil serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar khususnya di sektor jasa konstruksi. Tentunya hal tersebut menjadi tantangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku Jasa Konstruksi dalam rangka menghadapi persaingan global. Secara regulasi, hal tersebut telah memiliki payung hukum yang jelas dengan adanya UU Jasa Konstruksi mengenai klasifikasi dan kualifikasi, pelatihan tenaga kerja konstruksi, sertifikasi kompetensi kerja, registrasi pengalaman profesional, upah tenaga kerja konstruksi, dan pengaturan tenaga kerja konstruksi asing serta tanggung jawab profesi. Dengan demikian, Dinas PUPR perlu mengawasi implementasi Undang-undang tersebut dan terus membina sektor jasa konstruksi agar semakin baik dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang andal.

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Sumatera Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 yaitu **“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”**

Sejalan dengan pencapaian visi tersebut, misi Gubernur Sumatera Barat adalah :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya, berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah,
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional,
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi,
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional, global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah,
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2.1 Peran Strategis

Didalam dokumen awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan perubahan RPJMD Sumatera Barat (2016 – 2021) yang dibuat tahun 2018, dinyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Barat merupakan OPD yang memiliki peran strategis dan tanggungjawab untuk mendukung pencapaian misi 2 (dua) dan terutama misi 5 (lima) Gubernur Sumatera Barat seperti ditampilkan pada *tabel 2.1*.

Tabel 2.1 Peran Strategis Dinas PUPR dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

No	Misi Gubernur ke-	Tujuan ke-	Sasaran ke-	Strategi	Arah Kebijakan
1.	2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional	2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.	1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal serta pengawasan masyarakat dan ketegasan tindaklanjut b. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah c. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah d. Melakukan penguatan kelembagaan pengadaan barang dan jasa e. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government) f. Melakukan penyempurnaan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan indikator kinerja daerah, Perangkat Daerah dan individu aparatur. b. Penertiban dan tindaklanjut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dst... (RPJMD VI-5)

No	Misi Gubernur ke-	Tujuan ke-	Sasaran ke-	Strategi	Arah Kebijakan
				<p>penyelenggaraan pemerintahan nagari/desa/kelurahan</p> <p>Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik</p> <p>g. Meningkatkan kualitas produk hukum daerah</p>	
2.	<p>5. Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</p>	<p>1. Meningkatkan penyediaan Infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah</p>	<p>1. Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi</p>	<p>a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan provinsi</p> <p>b. Meningkatkan kerjasama pembangunan dalam rangka peningkatan konektifitas dan aksesibilitas wilayah</p>	<p>a. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan provinsi</p> <p>b. Rehabilitasi jalan dan jembatan provinsi</p> <p>c. Pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan hubungan dan pengembangan wilayah .</p> <p>d. Penyediaan dukungan untuk pembangunan infrastruktur prioritas dan strategis nasional (dukungan pembangunan jalan tol Padang – Batas Riau dan lain-lain)</p>

No	Misi Gubernur ke-	Tujuan ke-	Sasaran ke-	Strategi	Arah Kebijakan
3.	5. Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan penyediaan Infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	5. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung	a. Membenahi prasarana dan sarana umum di kawasan pemukiman/ perumahan dan lingkungan b. Meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan prasarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan	a. Pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh. b. Pengembangan sistem pengelolaan air minum regional, tempat pembuangan akhir regional, dan drainase. c. Peningkatan kualitas dan penataan bangunan dan lingkungan
4.	5. Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	2. Meningkatkan Pelaksanaan Tata Ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	1. Meningkatnya Kesesuaian rencana Pembangunan dengan tata ruang	a. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pembinaan dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW b. Melakukan pengkajian dan penyempurnaan RTRW sesuai kebutuhan pembangunan dan aturan yang berlaku	a. Penyusunan regulasi perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan mengacu pada rencana tata ruang. b. Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi c. Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang

No	Misi Gubernur ke-	Tujuan ke-	Sasaran ke-	Strategi	Arah Kebijakan
					Peningkatan keterkaitan d. antar pusat kegiatan sesuai dengan hirarki pengembangan sistim perkotaan

Sumber : Dokumen perubahan RPJMD Provinsi Sumbar (2016-2021)

Sedangkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-1038-2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-832-2018 Tentang Penetapan Hasil Rekomendasi Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 28 Desember 2018 dinyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mempunyai peran strategis dan tanggungjawab untuk mendukung pencapaian misi 5 (lima) Gubernur Sumatera Barat seperti ditampilkan pada *tabel 2.2*.

Tabel 2.2 Tabel Penyesuaian Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN GUBERNUR	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
MISI 5: Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan				
6	Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	6.1 Meningkatnya Konektivitas dan aksesibilitas wilayah 6.5 Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	6.1.1 Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap 6.5.1 Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat

Sumber : Lampiran II Keputusan Gubernur No. 065 - 1038 - 2018 (Biro Organisasi)

Sasaran Strategis Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang tertuang di dalam Cascading Perubahan sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-1038-2018 tersebut, selanjutnya akan menjadi **tujuan** dari OPD penanggung jawab/pendukung. Mengacu pada perubahan cascading Gubernur Provinsi Sumatera Barat sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-1038-2018 itu pula, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga ikut mengalami revisi cascading terkait sasaran dan tujuan Kepala Dinas (Eselon II). Akan tetapi perubahan cascading pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut belum dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2019.

Secara ringkasnya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Capaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD awal yang menjadi dasar Perjanjian Kinerja Eselon II dapat dilihat pada *tabel 2.3*.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja & Target Capaian Dinas PUPR sesuai RPJMD 2016-2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun -						Kinerja akhir periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	BB	BB	A	A	A
		Persentase Capaian Realisasi Fisik&Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan *	94.5%	95%	96%	97%	97%	98%	98%	98%
2	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Persentase Jalan Mantap	91,13% / 69%	70%	71%	72%	73%	74%	75%	75%
		Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	22 unit	5 unit	8 unit	8 unit	3 unit	5 unit	3 unit	54 unit (akumulasi kondisi awal-akhir periode RPJMD)
	Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Persentase cakupan air minum	68%	70%	72%	75%	80%	83%	86%	86%
		Persentase cakupan sanitasi	66,84%	72%	73%	75%	78%	79%	80%	80%
3	Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi	79%	80%	81%	82%	83%	84%	86%	86%

Sumber :Revisi Renstra dan LAKIP 2018

Keterangan : * tidak digunakan lagi pada PK (Perjanjian Kinerja) Perubahan Eselon II tahun 2019 berdasarkan rekomendasi tim evaluator SAKIP dari Kemenpan RB tahun 2019.

2.2 Perencanaan & Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat serta Isu-Isu Strategis, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai. Dalam hal ini Visi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah **“Mewujudkan Infrastruktur yang handal, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”**.

Infrastruktur yang **handal** dapat diartikan sebagai tingkat kondisi ketersediaan prasarana jalan dan jembatan yang berkualitas, menghubungkan antar wilayah di Provinsi Sumatera Barat dan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini diperlukan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan Gubernur yaitu meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Dengan meningkatnya konektivitas antar wilayah di Provinsi Sumatera Barat melalui prasarana jalan yang handal, maka diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, infrastruktur yang dimaksud juga mencakup aspek Keciptakarya yang berkualitas yang dapat diterjemahkan melalui penataan bangunan yang kokoh dan sesuai dengan fungsinya, cakupan pelayanan air minum yang layak, dan peningkatan pelayanan sanitasi sehingga menghasilkan lingkungan yang nyaman dan asri. Adapun Penataan Ruang yang berkelanjutan dalam hal ini adalah tersedianya penataan ruang yang efisien, berkelanjutan dan konsisten sehingga dapat dijadikan acuan dan rujukan dalam kegiatan pembangunan guna terciptanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antar aspek-aspek pembangunan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan.

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Meningkatkan kinerja organisasi (tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel).
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah terkait konektivitas-aksesibilitas wilayah.
3. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah terkait penyediaan sarana prasarana umum serta pelayanan dasar masyarakat.
4. Mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan.

Perencanaan Kinerja Dinas PUPR pada dasarnya mengacu pada dokumen RPJMD (2016-2021) dan visi misi Kepala Dinas yang diturunkan dari Visi-Misi Gubernur. Adapun Perencanaan Kinerja Dinas PUPR tahun 2019 ditunjukkan oleh tabel 2.4.

Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB
2	Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Persentase Jalan Mantap	73 %
3	Meningkatnya sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintah	3 unit
		Persentase cakupan air minum	80 %
		Persentase cakupan sanitasi	78 %
4	Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi	83 %

Perencanaan Kinerja berisikan target dan indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ingin dicapai pada tahun 2019. Berdasarkan perencanaan kinerja tersebut maka dibuat Perjanjian Kinerja Kepala Dinas (Eselon II) sebagai bentuk komitmen antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Gubernur Sumatera Barat selaku Kepala Daerah. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas (Eselon II) mencakup semua program kegiatan yang ada pada dinas untuk mewujudkan target kinerja yang direncanakan pada tahun 2019. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada awal Tahun 2019 ditunjukkan oleh tabel 2.5.

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Awal Kepala Dinas PUPR tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	a. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan b. Pelaksanaan Program/ Kegiatan Sesuai dengan Anggaran Kas	BB 97.00 %
2	Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	a. Persentase Jalan Mantap	73.00 %
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Umum dan Aparatur Serta	a. Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Tata	3.00 unit

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Pelayanan Dasar Masyarakat	Pemerintahan	
		b. Persentase Cakupan Layanan Dasar Masyarakat - Persentase Cakupan Air Minum - Persentase Cakupan Sanitasi	80.00 % 78.00 %
4	Meningkatnya Pelaksanaan Tata Ruang Yang Baik dan Konsekuensi Berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung	a. Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi	83.00 %

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,816,161,000	APBD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,044,500,000	APBD
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	297,700,000	APBD
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	206,586,000	APBD
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1,409,151,928	APBD
6	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi	185,970,198,000	APBD, DAK
7	Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi	45,455,344,000	APBD
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke-Binamargaan	3,145,168,000	APBD
9	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	913,790,000	APBD
10	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	243,998,918,000	APBD
11	Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi	673,788,000	APBD
12	Perencanaan Tata Ruang	4,592,900,000	APBD
13	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	424,759,000	APBD
14	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/ kota	3,878,809,000	APBD
15	Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi	4,950,000,000	APBD
16	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	323,100,000	APBD
	JUMLAH	505,100,872,928	

Selanjutnya, berdasarkan Rapat Evaluasi Kinerja di Biro Organisasi tanggal 16 Desember 2019, sesuai rekomendasi tim evaluator SAKIP dari Kemenpan RB pada saat evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2019, dinyatakan bahwa **“Persentase Capaian Realisasi Fisik & Keuangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan”** tidak lagi menjadi Indikator Kinerja untuk mengukur keberhasilan setiap OPD dalam melaksanakan peran dan tanggungjawabnya. Sehingga akhir tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang membuat Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Kepala Dinas (Eselon II) dengan menghilangkan indikator yang dimaksud sebagaimana ditunjukkan pada *tabel 2.6*.

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas PUPR tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB
2	Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	a. Persentase Jalan Mantap	73.00 %
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Umum dan Aparatur Serta Pelayanan Dasar Masyarakat	a. Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Tata Pemerintahan b. Persentase Cakupan Layanan Dasar Masyarakat - Persentase Cakupan Air Minum - Persentase Cakupan Sanitasi	3.00 unit 80.00 % 78.00 %
4	Meningkatnya Pelaksanaan Tata Ruang Yang Baik dan Konsekuensi Berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung	a. Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi	83.00 %

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,495,289,048	APBD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6,619,374,100	APBD
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	275,352,800	APBD
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	264,800,000	APBD
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1,661,967,928	APBD
6	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi	184,577,512,989	APBD, DAK
7	Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi	48,377,347,200	APBD
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke-Binamargaan	3,735,168,000	APBD
9	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	913,790,000	APBD

10	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	214,708,096,624	APBD
11	Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi	773,788,000	APBD
12	Perencanaan Tata Ruang	4,733,380,000	APBD
13	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	424,759,000	APBD
14	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/ kota	1,638,277,400	APBD
15	Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi	4,805,000,000	APBD
16	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	182,620,000	APBD
	JUMLAH	479,186,523,089	

2.2.1 Sasaran Strategis

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas (Eselon II) dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a) Meningkatkan tata kelola organisasi

Adapun tata kelola organisasi Dinas PUPR mencakup kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi, kualitas pelayanan internal organisasi, kualitas penatausahaan keuangan, dan pengawasan internal organisasi.

b) Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah

Salah satu indikator dalam tercapainya konektivitas dan aksesibilitas wilayah adalah meningkatnya kemantapan jalan. Kemantapan jalan merupakan definisi dalam penanganan jalan yang menyatakan kualitas fisik dan layanan jalan yang dianggap cukup untuk memenuhi syarat minimal bahwa suatu ruas jalan dapat dioperasikan dalam menjalankan fungsinya secara optimal.

c) Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat

Adapun sarana dan prasarana umum dan aparatur meliputi penyediaan Bangunan Gedung Pemerintah, Rumah Negara, Shelter dan Bangunan Strategis lainnya yang aman dan nyaman serta untuk meningkatkan penyediaan layanan air minum dan sanitasi.

d) Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung. Tercapainya kinerja penataan ruang yang tinggi seperti yang diatur dalam UU No 9 Tahun 2015 dan UU No. 26 Tahun 2007.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021, perlu ditetapkan strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut.

Sasaran 1. Meningkatnya tata kelola organisasi

Untuk meningkatkan tata kelola organisasi dibutuhkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.7 Strategi dan Kebijakan Sasaran 1

No	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi	Penyampaian dokumen perencanaan (Renstra, RKT, dan Perjanjian Kinerja) dan pelaporan organisasi dengan tepat waktu
		Peningkatan kualitas pelaporan kinerja organisasi
2	Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi	Penyediaan data kepegawaian yang akurat
		Peningkatan layanan administrasi kepegawaian
		Peningkatan pengelolaan sarana prasarana
3	Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan
		Peningkatan kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dengan aturan
4	Meningkatkan pengawasan internal organisasi	Peningkatan tindak lanjut temuan pemeriksaan
		Meningkatnya pejabat ASN yang mengisi LHKPN/LHKASN

Sasaran 2. Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah

Untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah dibutuhkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.8 Strategi dan Kebijakan Sasaran 2

No	Strategi	Kebijakan
1	Pengurangan jalan yang belum terhubung antar daerah dan terisolir	Pembangunan jalan yang belum terhubung antar daerah terisolir
2	Meningkatan prasarana perhubungan menuju destinasi wisata dan pelabuhan	Pembangunan jalan menuju daerah wisata dan pelabuhan udara/laut
3	Meningkatan kualitas dan kapasitas jalan	Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan
		Peningkatan jalan

Sasaran 3. Meningkatnya sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat

Untuk meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat dibutuhkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.9 Strategi dan Kebijakan Sasaran 3

No	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan penyediaan bangunan gedung pemerintah, rumah negara dan bangunan strategis lainnya yang aman dan nyaman	Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah, rumah negara dan bangunan strategis
		Pemeriksaan laik fungsi oleh tim ahli bangunan gedung (TABG)
		Peningkatan kualitas tenaga teknis
2	Meningkatkan penyediaan layanan air minum dan sanitasi	Pembangunan infrastruktur air minum
		Pembangunan infrastruktur sanitasi

Sasaran 4. Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung

Untuk meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung dibutuhkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

2.10 Strategi dan Kebijakan Sasaran 4

No	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan RTR yang berkekuatan hukum	Pengkajian&penyempurnaan RTRW, RDTR, PZ
		Penyediaan dikumen RTRW, RDTR dan PZ
		Penyediaan data spasial
2	Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR	Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan pembinaan pemanfaatan ruang
		Peningkatan kuantitas PPNS Tata Ruang

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target indikator kinerja sasaran strategis pada tahun 2019. Untuk menghitung besaran persentase capaian kinerja, secara matematis ditulis sebagai berikut :

a.) $\frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$ (realisasi yang **besar** menunjukkan **kinerja baik**)

Artinya : Semakin besar % capaian kinerja, maka semakin baik kinerja suatu indikator , demikian sebaliknya.

b.) $\frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$ (realisasi yang **besar** menunjukkan kinerja **tidak baik**)

Artinya : Semakin besar % capaian kinerja, maka semakin buruk/tidak baik kinerja suatu indikator , demikian sebaliknya.

Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat serta menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalannya. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diketahui ada 4 (empat) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja dinas pada tahun 2019. Hasil dari pengukuran kinerja setiap indikator dibahas pada sub bab berikut.

3.2.1 Hasil Nilai Akuntabilitas Kinerja

Pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat menargetkan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja adalah BB. Hasil pengukuran indikator

kinerja ini berdasarkan hasil penilaian LAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat selaku tim evaluator Provinsi dan Biro Organisasi selaku OPD pembimbing.

Tabel 3.1 Pengukuran Target Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	Tim evaluator

3.2.2 Hasil Kinerja Indikator Persentase Jalan Mantap

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 600-903.1-2015 tentang Penetapan Ruas-ruas jalan menurut Fungsi dan Statusnya diketahui bahwa total panjang jalan provinsi Sumatera Barat adalah 1525,20 km. Pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat menargetkan persentase kemantapan jalan provinsi sebesar 73 %. Berdasarkan laporan hasil survey IRMS yang telah dilakukan, diperoleh bahwa Persentase kemantapan jalan provinsi pada Tahun 2019 sebesar 73,015%. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut :

$$\% \text{ kemantapan jalan} = \frac{\text{total panjang jalan mantap per ruas (km)}}{\text{total panjang jalan provinsi (km)}} \times 100\%$$

$$\% \text{ kemantapan jalan} = \frac{1113,628}{1525,200} \times 100 \%$$

$$\% \text{ kemantapan jalan} = 73,015 \%$$

Hal ini menunjukkan bahwa telah tercapainya target persentase jalan mantap provinsi untuk tahun 2019 seperti ditampilkan pada *Tabel 3.2*.

Tabel 3.2 Pengukuran Target Kinerja Kemantapan Jalan Dinas PUPR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan	Persentase jalan mantap	73%	73.015 %

Sumber data : Laporan Akhir Survey IRMS 2019

Berdasarkan IKU Gubernur Provinsi Sumatera Barat diketahui bahwa penetapan ruas jalan yang terkoneksi jalan mantap diukur berdasarkan jumlah ruas jalan di Provinsi Sumatra Barat dengan kondisi mantap $\geq 72\%$. Dari laporan hasil survey IRMS yang dilakukan diketahui bahwa jumlah ruas jalan yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap $\geq 72\%$ adalah sebanyak 40 ruas dengan panjang total jalan mantap 1113.628 km seperti ditampilkan pada *tabel 3.3 dan tabel 3.4*.

Tabel 3.3 Pengukuran Target Kinerja Pemerintah Provinsi Sumbar Jumlah Ruas Jalan yang terkoneksi dengan Kondisi Jalan Mantap

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	37	40

Sumber data : Laporan Akhir Survey IRMS 2019

Hasil pengukuran indikator Persentase kemantapan jalan berdasarkan laporan akhir survey IRMS (*Integrated Road Management System*) ditampilkan pada tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Rekapitulasi Kondisi Jalan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

NAMA PROPINSI	PANJANG (SK)	KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI								KEMANTAPAN JALAN			
		BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT		MANTAP		TIDAK MANTAP	
		(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%
SUMATERA BARAT	1525.200	226.888	14.876	886.740	58.139	150.200	9.848	261.372	17.137	1113.628	73.015	411.572	26.985

Sumber data : Laporan Akhir Survey IRMS 2019

Tabel 3.5 Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Barat Per Ruas Tahun 2019

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	PAN JANG (SK)	KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI								KEMANTAPAN JALAN			
				BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT		MANTAP		TIDAK MANTAP	
				(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%
1	13.007	SIMANCUNG - TANJUNG AMPALU	11.080	2.100	18.953	8.580	77.437	0.400	3.610	0.000	0.000	10.680	96.390	0.400	3.610
2	13.008	TANJUNG AMPALU - SIJUNJUNG	20.000	4.900	24.500	13.200	66.000	1.700	8.500	0.200	1.000	18.100	90.500	1.900	9.500
3	13.010	SIMP.SIKABAU - SIMP.KOTO BARU	29.000	1.300	4.483	23.200	80.000	2.700	9.310	1.800	6.207	24.500	84.483	4.500	15.517

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	PAN JANG (SK)	KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI								KEMANTAPAN JALAN			
				BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT		MANTAP		TIDAK MANTAP	
				(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%
4	13.011	SIMP.KOTO BARU - TANJUNG SIMALIDU	11.900	0.700	5.882	9.500	79.832	1.600	13.445	0.100	0.840	10.200	85.714	1.700	14.286
5	13.012	SIMP.KOTO BARU - JUNCTION	5.400	0.700	12.963	4.000	74.074	0.700	12.963	0.000	0.000	4.700	87.037	0.700	12.963
6	013.018	INDRAPURA - MUARA SAKAI	7.300	3.600	49.315	3.300	45.205	0.200	2.740	0.200	2.740	6.900	94.521	0.400	5.479
7	06.025	MANGGOPOH - PADANG LUAR	69.430	11.000	15.843	37.530	54.054	19.900	28.662	1.000	1.440	48.530	69.898	20.900	30.102
8	06.028	SICINCIN - KURAITAJI	16.440	2.100	12.774	12.740	77.494	1.600	9.732	0.000	0.000	14.840	90.268	1.600	9.732
9	013.031	PANTI - SIMPANG EMPAT	74.230	3.600	4.850	59.730	80.466	9.700	13.067	1.200	1.617	63.330	85.316	10.900	14.684
10	06.033	SIMP. EMPAT - SASAK	20.000	2.500	12.500	14.800	74.000	2.700	13.500	0.000	0.000	17.300	86.500	2.700	13.500
11	06.034.2	AIR BALAM - AIR BANGIS	12.600	0.800	6.349	11.720	93.016	0.080	0.635	0.000	0.000	12.520	99.365	0.080	0.635
12	06.035	KUBU KERAMBIL - BATUSANGKAR	18.500	2.000	10.811	12.900	69.730	3.600	19.459	0.000	0.000	14.900	80.541	3.600	19.459
13	06.036	BASO - BTS BATUSANGKAR (BALAI SELASA)	28.790	3.000	10.420	22.990	79.854	2.800	9.726	0.000	0.000	25.990	90.274	2.800	9.726
14	06.037	BTS BATUSANGKAR (BUKIT GOMBAK) - GUGUK CINO	10.400	4.400	42.308	5.100	49.038	0.900	8.654	0.000	0.000	9.500	91.346	0.900	8.654
15	06.038.2	GUGUK CINO - SAWAHLUNTO (LAPANGAN SEGITIGA)	30.600	0.500	1.634	27.100	88.562	2.600	8.497	0.400	1.307	27.600	90.196	3.000	9.804

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	PAN JANG (SK)	KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI								KEMANTAPAN JALAN			
				BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT		MANTAP		TIDAK MANTAP	
				(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%
16	06.039	GUGUK CINO - SITANGKAI	15.120	0.000	0.000	12.920	85.450	1.700	11.243	0.500	3.307	12.920	85.450	2.200	14.550
17	06.040	SITANGKAI - TANJUNG AMPALU	17.280	4.300	24.884	10.500	60.764	2.480	14.352	0.000	0.000	14.800	85.648	2.480	14.352
18	06.044	BTS KOTA PAYAKUMBUH - SITANGKAI	50.610	4.600	9.089	37.710	74.511	7.700	15.214	0.600	1.186	42.310	83.600	8.300	16.400
19	06.054	JUNCTION - ABAISIAT	12.600	2.600	20.635	9.800	77.778	0.200	1.587	0.000	0.000	12.400	98.413	0.200	1.587
20	06.055	SIJUNJUNG - TANAH BADANTUNG	4.400	0.000	0.000	4.100	93.182	0.300	6.818	0.000	0.000	4.100	93.182	0.300	6.818
21	06.056.1	SIMP.PADANG ARO - LUBUK MALAKO	20.000	8.300	41.500	7.970	39.850	1.700	8.500	2.030	10.150	16.270	81.350	3.730	18.650
22	06.056.2	LUBUK MALAKO - ABAI SANGIR	17.000	0.100	0.588	11.200	65.882	3.600	21.176	2.100	12.353	11.300	66.471	5.700	33.529
23	06.056.3	ABAI SANGIR - SEI DAREH	74.000	2.700	3.649	33.120	44.757	7.300	9.865	30.880	41.730	35.820	48.405	38.180	51.595
24	06.068	PADANGSAWAH - KUMPULAN	36.500	8.600	23.562	22.810	62.493	4.800	13.151	0.290	0.795	31.410	86.055	5.090	13.945
25	06.069.2	BATAS PAYAKUMBUH - SULIKI - KOTO TINGGI	46.850	7.000	14.941	33.350	71.185	6.200	13.234	0.300	0.640	40.350	86.126	6.500	13.874
26	06.070	BATUSANGKAR - OMBILIN	18.510	2.800	15.127	13.800	74.554	1.900	10.265	0.010	0.054	16.600	89.681	1.910	10.319
27	06.071	SOLOK- ALAHAN PANJANG	47.800	5.700	11.925	35.300	73.849	5.700	11.925	1.100	2.301	41.000	85.774	6.800	14.226
28	06.072	LUBUK BASUNG - SUNGAI LIMAU	30.900	5.100	16.505	20.700	66.990	5.100	16.505	0.000	0.000	25.800	83.495	5.100	16.505

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	PAN JANG (SK)	KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI								KEMANTAPAN JALAN			
				BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT		MANTAP		TIDAK MANTAP	
				(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%
29	06.073	PASAR BARU - ALAHAN PANJANG	49.400	1.300	2.632	27.755	56.184	9.100	18.421	11.245	22.763	29.055	58.816	20.345	41.184
30	06.075	SIMP DUKU (KETAPING) - PARIAMAN	20.500	10.100	49.268	8.720	42.537	1.500	7.317	0.180	0.878	18.820	91.805	1.680	8.195
31	06.076	PANGKALAN KT.BARU- SIALANG - GELUGUR	73.950	4.600	6.220	46.340	62.664	2.100	2.840	20.910	28.276	50.940	68.884	23.010	31.116
32	06.078	SIMP.KOTO MAMBANG - BALINGKA	39.400	32.000	81.218	7.150	18.147	0.000	0.000	0.250	0.635	39.150	99.365	0.250	0.635
33	06.079	SIMP BASO - PILADANG	11.140	2.600	23.339	4.640	41.652	1.900	17.056	2.000	17.953	7.240	64.991	3.900	35.009
34	06.080	MATUR - PALEMBAYAN	20.700	3.800	18.357	13.400	64.734	2.700	13.043	0.800	3.865	17.200	83.092	3.500	16.908
35	06.081	PALEMBAYAN - PALUPUH (SIMP.PATAI)	13.300	0.300	2.256	12.000	90.226	1.000	7.519	0.000	0.000	12.300	92.481	1.000	7.519
36	06.082	ALAHAN PANJANG - KILIRAN JAO	72.900	0.938	1.287	33.480	45.926	7.900	10.837	30.582	41.951	34.418	47.213	38.482	52.787
37	06.083	TELUK KABUNG - MANDEH - TARUSAN	44.100	17.800	40.363	25.900	58.730	0.400	0.907	0.000	0.000	43.700	99.093	0.400	0.907
38	06.084	JL. LINGKAR SELATAN (PAYAKUMBUH)	14.170	6.000	42.343	7.170	50.600	1.000	7.057	0.000	0.000	13.170	92.943	1.000	7.057
39	06.085	SIMPANG PADANG KARAMBIA - TJ. BUNGO (TPA REGIONAL)	2.050	0.000	0.000	2.000	97.561	0.050	2.439	0.000	0.000	2.000	97.561	0.050	2.439
40	06.086	SURANTIAH - KAYU ARO - LANGGAI	27.700	0.600	2.166	16.100	58.123	1.200	4.332	9.800	35.379	16.700	60.289	11.000	39.711
41	06.087	DUKU - SICINCIN	28.650	1.000	3.490	8.000	27.923	0.500	1.745	19.150	66.841	9.000	31.414	19.650	68.586

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	PAN JANG (SK)	KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI								KEMANTAPAN JALAN			
				BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT		MANTAP		TIDAK MANTAP	
				(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%
42	06.088	PADANG KOTO GADANG - PALEMBAYAN	31.000	3.600	11.613	20.800	67.097	3.700	11.935	2.900	9.355	24.400	78.710	6.600	21.290
43	06.089	JL. BALINGKA - TEROWONGAN - NGARAI SIANOK	9.700	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9.700	100.000	0.000	0.000	9.700	100.000
44	06.090	PALUPUAH - PUA GADIH - KOTO TINGGI	25.000	1.000	4.000	9.460	37.840	4.790	19.160	9.750	39.000	10.460	41.840	14.540	58.160
45	06.091	SIMPANG NAPAL - BUKIT BUAL - TANJUNG AMPALU	23.000	0.300	1.304	5.700	24.783	0.500	2.174	16.500	71.739	6.000	26.087	17.000	73.913
46	06.092	SP. GANTING PAYO - BATAS TANAH DATAR - SUMANI	28.400	10.100	35.563	17.500	61.620	0.800	2.817	0.000	0.000	27.600	97.183	0.800	2.817
47	06.093	SINGKARAK - ARIPAN - TJ. BALIT - PADANG GANTING	30.000	2.200	7.333	22.700	75.667	2.500	8.333	2.600	8.667	24.900	83.000	5.100	17.000
48	06.094	PINTU ANGIN - LUBUAK SAIYO	5.500	5.200	94.545	0.255	4.636	0.000	0.000	0.045	0.818	5.455	99.182	0.045	0.818
49	06.095	RAO - ROKAN (BATAS RIAU)	33.000	7.900	23.939	21.850	66.212	2.900	8.788	0.350	1.061	29.750	90.152	3.250	9.848
50	06.096	LUBUK SIKAPING - TALU	28.000	3.200	11.429	15.300	54.643	0.300	1.071	9.200	32.857	18.500	66.071	9.500	33.929
51	06.097	BUNGO TANJUNG - TELUK TAPANG	43.200	7.750	17.940	5.450	12.616	0.500	1.157	29.500	68.287	13.200	30.556	30.000	69.444
52	06.098	TELUK BAYUR - NIPAH - PURUS	12.000	3.700	30.833	7.150	59.583	0.000	0.000	1.150	9.583	10.850	90.417	1.150	9.583

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	PAN JANG (SK)	KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI								KEMANTAPAN JALAN			
				BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT		MANTAP		TIDAK MANTAP	
				(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%
53	06.099	PURUS - BANDARA INTERNASIONAL MINANG KABAU	16.000	0.500	3.125	1.700	10.625	0.000	0.000	13.800	86.250	2.200	13.750	13.800	86.250
54	06.100	BATU BATEMBAK - PELABUHAN PANASAHAN	1.200	0.300	25.000	0.750	62.500	0.100	8.333	0.050	4.167	1.050	87.500	0.150	12.500
55	06.101	TAPUS - MUARO SEI. LOLO - GELUGUR	47.000	0.700	1.489	20.000	42.553	0.700	1.489	25.600	54.468	20.700	44.043	26.300	55.957
56	06.102	RAWANG - TALAWI	6.000	0.100	1.667	2.800	46.667	0.500	8.333	2.600	43.333	2.900	48.333	3.100	51.667
57	06.103	SIMPANG SP II - KANTOR CAMAT	5.100	4.300	84.314	0.000	0.000	0.800	15.686	0.000	0.000	4.300	84.314	0.800	15.686
58	06.104	KANTOR CAMAT - BERKAT	5.900	0.000	0.000	3.000	50.847	2.900	49.153	0.000	0.000	3.000	50.847	2.900	49.153
TOTAL			1525.200	226.888	14.876	886.740	58.139	150.200	9.848	261.372	17.137	1113.628	73.015	411.572	26.985

Sumber data : Laporan Akhir Survey IRMS 2019

3.2.3 Hasil Kinerja Indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Tata Pemerintahan

Adapun sarana dan prasarana umum penunjang tata pemerintahan dapat berbentuk Bangunan Gedung Pemerintah, Rumah Negara, Shelter dan Bangunan Strategis lainnya. Penghitungan target kinerja sasaran adalah **sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan yang telah selesai dibangun dan siap ditempati pada tahun 2019**, bisa saja pembangunan bangunan tersebut telah dimulai pada tahun sebelumnya atau pembangunannya hanya pada tahun 2019 saja dan langsung siap difungsikan/beroperasional pada tahun kinerja yang dimaksud. Sedangkan bangunan yang masih sedang dalam proses pembangunan atau lanjutan tidak dihitung sebagai indikator pada sasaran ini.

Pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menargetkan 3 unit sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan yang selesai dan dalam pelaksanaannya realisasi capaian adalah 3 sarana dan prasarana yaitu :

1. Gedung Bundo Kandung Provinsi Sumatera Barat.
2. Gedung Kantor Samsat Kota Padang.
3. Shelter Evakuasi Tsunami di Mushalla Jabal Rahmah painan.

Gedung *Convention Hall*, pada prinsipnya bangunan utama gedung tersebut telah selesai tahun 2018 lalu, akan tetapi belum bisa difungsikan karna menunggu *landscape* gedung yang pengerjaannya dilaksanakan pada tahun 2019 ini. Sehingga tahun ini gedung *Convention Hall* sudah bisa beroperasi.

Tabel 3.6 Target dan Capaian Indikator Sarana dan Prasarana Penunjang Tata Pemerintahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	3 unit	3 unit

Sumber data : Bidang Cipta Karya

3.2.4 Hasil Kinerja Indikator Persentase Cakupan Air Minum

Cakupan air minum merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target *Universal Access* Nasional. Pada Tahun 2019 ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menargetkan capaian sebesar 80% untuk cakupan air minum Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Data persentase cakupan layanan air minum provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 diperoleh dari Bidang Cipta Karya berupa “*Rekapitulasi Analisa Data Cakupan Akses Penyediaan Layanan Air Minum dan Daerah Rawan Air Per kab/kota di Sumatera Barat sampai tahun 2019*” yang bersumber dari data PDAM Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat dan Pamsimas diketahui capaian persentase cakupan air minum pada Tahun 2019 adalah sebesar 78,65 %, lebih kecil dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu 80%. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut :

$$\% \text{ cakupan air minum} = \frac{\text{jumlah penduduk akses aman (jiwa)}}{\text{total jumlah penduduk (jiwa)}} \times 100\%$$

$$\% \text{ cakupan air minum} = \frac{3979882}{5060063} \times 100 \%$$

$$\% \text{ cakupan air minum} = 78,65 \%$$

Untuk mencapai target pemenuhan cakupan air minum, pada prinsipnya merupakan program/kegiatan yang terdapat di kabupaten/kota. Data capaian air minum provinsi Sumatera Barat bersumber dari rekap data PDAM, non PDAM dan Pamsimas yang ada di kabupaten/kota . Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat hanya menangani SPAM Regional. Pada Tahun 2019 ini pembangunan SPAM Regional di APBD Dinas PUPR baru sampai tahapan FS (Studi Kelayakan) dan Dokumen perencanaan DED.

Tabel 3.7 Target dan Capaian Indikator Persentase Cakupan Air Minum di Sumatera Barat Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur layanan Dasar Masyarakat	Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	80%	78,65%

Sumber data : Bidang Cipta Karya (*Rekapitulasi Data Cakupan Air Minum*) per kab/kota

Tabel 3.8 Rekapitulasi Analisa Data Cakupan Akses Penyediaan Layanan Air Minum dan Daerah Rawan Air Per kab/kota di Sumatera Barat sampai tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	AKSES PENYEDIAAN AIR MINUM						AKSES AMAN		AKSES TIDAK AMAN		DAERAH RAWAN AIR
			JARINGAN PERPIPAAN				NON PERPIPAAN						
			PDAM		NON PDAM		(SGL+PMA+PAH)		Jiwa	(%)	Jiwa	(%)	NAGARI/KEL
			(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)					
	SUMBAR	5,060,063	1,909,509	37.74	561,316	11.09	1,509,058	29.82	3,979,882	78.65	1,080,181	21.35	139
1	Kab. Agam	466,978	145,330	31.12	59,652	12.13	174,837	37.44	376,819	80.69	90,159	19.31	5
2													
2	Kab. Dharmasraya	209,123	2,282	1.09	15,120	5.32	128,818	61.60	142,220	68.01	66,903	31.99	7
3	Kab. Kepulauan Mentawai	82,751	4,849	5.86	7,788	7.60	10,958	13.24	22,095	26.70	60,656	73.30	30
4	Kab. Lima Puluh Kota	364,598	59,359	13.49	55,733	14.19	150,988	41.41	251,905	69.09	112,693	30.91	16
5	Kab. Padang Pariaman	380,830	110,689	26.01	25,646	5.68	171,116	44.93	291,800	76.62	89,030	23.38	6
6	Kab. Pasaman	263,838	154,201	55.76	38,341	13.21	28,069	10.64	210,031	79.61	53,807	20.39	4
7	Kab. Pasaman Barat	392,781	100,714	23.44	58,844	13.96	176,675	44.98	323,598	82.39	69,183	17.61	5
8	Kab. Pesisir Selatan	442,824	134,411	28.03	27,557	5.55	209,133	47.23	357,810	80.80	85,014	19.20	13
9	Kab. Sijunjung	214,529	71,250	29.68	39,819	17.49	68,665	32.01	169,854	79.18	44,675	20.82	9

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	AKSES PENYEDIAAN AIR MINUM						AKSES AMAN		AKSES TIDAK AMAN		DAERAH RAWAN AIR
			JARINGAN PERPIPAAN				NON PERPIPAAN						
			PDAM		NON PDAM		(SGL+PMA+PAH)		Jiwa	(%)	Jiwa	(%)	NAGARI/KEL
			(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)					
10	Kab. Solok	358,382	112,286	29.88	119,994	32.65	44,973	12.55	269,048	75.07	89,334	24.93	13
11	Kab. Solok Selatan	153,942	31,783	20.65	41,328	24.90	52,442	34.07	122,553	79.61	31,389	20.39	8
12	Kab. Tanah Datar	342,864	114,592	33.42	16,405	4.35	139,191	40.60	268,689	78.37	74,175	21.63	4
13	Kota Bukittinggi	118,260	51,002	43.13	2,005	0.43	24,203	20.47	75,709	64.02	42,551	35.98	8
14	Kota Padang	879,442	592,980	64.53	29,140	3.09	18,860	2.14	613,505	69.76	265,937	30.24	3
15	Kota Padang Panjang	48,792	33,736	69.14	-	-	10,559	21.64	44,295	90.78	4,498	9.22	-
16	Kota Pariaman	82,629	7,488	9.06	9,555	9.75	57,588	69.69	73,131	88.51	9,498	11.49	6
17	Kota Payakumbuh	124,057	101,132	81.52	9,228	6.23	11,024	8.89	119,884	96.64	4,173	3.36	-
18	Kota Sawah Lunto	68,626	30,428	44.34	2,948	2.11	23,437	34.15	55,312	80.60	13,314	19.40	2
19	Kota Solok	64,817	50,998	78.68	2,213	1.10	7,522	11.61	59,234	91.39	5,583	8.61	-

Sumber : PDAM Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat dan Pamsimas

3.2.5 Hasil Kinerja Indikator Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Sebagaimana air minum, sanitasi merupakan salah satu indikator yang termuat dalam *Universal Access*. Pada Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat menargetkan capaian Persentase Rumah Tangga Bersanitasi sebesar 78 % . Berdasarkan data persentase cakupan layanan sanitasi provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 yang diperoleh dari Bidang Cipta Karya berupa “*Laporan Kemajuan Akses Jamban Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019*” yang bersumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat diketahui bahwa realisasi capaian adalah sebesar 79,78 % . Nilai ini melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu 78%. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut :

$$\% \text{ cakupan sanitasi} = \frac{\text{jumlah \% akses sanitasi 19 kab/kota}}{19} \times 100\%$$

$$\% \text{ cakupan air minum} = 79,78 \%$$

Tabel 3.9 Target dan Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga Bersanitasi di Sumatera Barat Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur layanan Dasar Masyarakat	Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	78%	79,78%

Sumber data : Bidang Cipta Karya (*Laporan Kemajuan Akses Jamban Provinsi Sumatera Barat*)

Tabel 3.10 Laporan Kemajuan Akses Jamban Provinsi Sumatera Barat Desember 2019

No	Nama Kabupaten	Identitas Data (Jumlah data/keseluruhan*)			Kemajuan								
		Jumlah Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah KK	JSP	% Akses JSP	JSSP	% Akses JSSP	Sharing	% Akses Sharing	BABS	% Akses BABS	% Akses PProgres
1	KOTA PAYAKUMBUH	5/5	48/48	31882/24056	30345	95.52	298	1.04	1239	3.44	0	0	100.00
2	KOTA SOLOK	2/2	13/13	18704/14565	17143	92.57	438	2.29	1123	5.14	0	0	100.00
3	KOTA PADANG PANJANG	2/2	16/16	12031/11754	10706	85.41	18	0.15	1307	14.44	0	0	100.00
4	KOTA BUKITTINGGI	3/3	24/24	26057/26779	20540	77.46	3841	15.54	695	3.39	981	3.61	96.39
5	KOTA PADANG	11/11	104/104	207877/197561	178532	82.5	8432	5.49	9343	4.85	11570	7.16	92.84
6	KOTA SAWAH LUNTO	4/4	37/37	16442/15353	13185	81.35	1085	6.11	465	2.46	1707	10.07	89.93
7	KOTA PARIAMAN	4/4	71/71	19919/19418	13145	67.21	3805	17.44	935	5.06	2034	10.3	89.70
8	DHARMASRAYA	11/11	52/52	51355/50276	42541	78.34	3009	6.07	1951	3.86	3854	11.73	88.27
9	PESISIR SELATAN	15/15	182/182	135467/110125	95817	65.04	15258	13.52	8936	8.46	15456	12.98	87.02
10	AGAM	16/16	82/82	111253/118665	50453	47.87	35969	27.71	7758	7.83	17073	16.59	83.41
11	SIJUNJUNG	8/8	62/62	56192/54831	32931	51.67	11086	23.06	3112	7.91	9063	17.36	82.64
12	TANAH DATAR	14/14	75/75	101815/92201	63229	65.75	7038	5.61	5448	5.46	26100	23.18	76.82
13	PASAMAN BARAT	11/11	19/19	90289/92235	36667	42.99	18142	18.49	9441	10.91	26039	27.61	72.39
14	SOLOK	14/14	74/74	88756/94553	38317	41.94	12951	16.59	7414	9.88	30074	31.6	68.40
15	LIMA PULUH KOTA	13/13	79/79	93472/94966	49699	54.17	9091	10.88	652	0.68	34030	34.27	65.73
16	SOLOK SELATAN	7/7	39/39	42267/40298	21119	54.39	2939	8.03	709	1.08	17500	36.5	63.50
17	PADANG PARIAMAN	17/17	60/60	80320/98788	43658	53.31	70	0.09	5968	7.66	30624	38.95	61.05
18	KEPULAUAN MENTAWAI	10/10	43/43	20992/18866	3259	16.75	4179	19.92	2184	10.19	11370	53.14	46.86
19	PASAMAN	12/12	32/37	67482/66373	28648	40.44	563	0.77	4999	7.64	33272	51.15	48.85
	SUMATERA BARAT	179/179	1112/1117	1272572/1241663	789934	61.85	138212	11.67	73679	6.26	270747	20.22	79.78

Sumber data : Dinkes Provinsi Sumatera Barat

3.2.6 Hasil Kinerja Indikator Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang

Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 ditargetkan Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang sebesar 83%. Hal ini sekaligus menunjang capaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat dalam Tujuan 2 Misi 5. Sedangkan dalam Pergub Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2017, dijelaskan bahwa Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Perencanaan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang Pengawasan Penataan Ruang. Dalam pelaksanaannya diperoleh persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang sebesar 84%

Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
1	Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi	83%	84%

Sumber data : Bidang Tata Ruang

3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, ditetapkan kategori penilaian capaian indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.12 Klasifikasi Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis Dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	75% - 84%	Baik
3	56% - 74%	Cukup
4	< 55%	kurang

Untuk menghitung besaran persentase capaian kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

3.3.1 Capaian Kinerja Indikator Persentase Jalan Mantap

3.3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Untuk persentase kemantapan jalan provinsi, (%) capaian adalah perbandingan antara target dan realisasi yang secara matematis ditulis sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{73,015}{73,000} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = 100,02 \%$$

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Indikator Persentase Jalan Mantap

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan	Persentase jalan mantap	73%	73.015 %	100.02%

Dengan pencapaian atas target sebesar 100,02% tersebut maka klasifikasi penilaian untuk persentase kemantapan jalan provinsi adalah **Sangat Baik**.

3.3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian dengan Tahun Lalu

Perbandingan Realisasi kinerja dan capaian Persentase Jalan Mantap pada tahun 2017, 2018 & 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian Jalan Mantap tahun 2017, 2018 & 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1.	Persentase jalan mantap	71	72	73	71.05	72.058 (36 ruas)	73.015 (40 ruas)	100.07	100.08	100.02

Sumber data : LAKIP 2017, 2018

Dari tabel 3.14 diketahui bahwa realisasi persentase (%) kemantapan jalan dari tahun 2017, 2018 dan 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan jumlah ruas jalan yang kondisinya mantap juga meningkat dari tahun sebelumnya.

3.3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d tahun 2019 terhadap Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah (target akhir periode renstra) yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi 2019}}{\text{Target 2021}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{73,015}{75,00} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = 97,35 \%$$

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d 2019 Terhadap Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI s/d 2019	TARGET 2021	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan	Persentase jalan mantap	73,015%	75 %	97,35%

3.3.1.4 *Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Standar Nasional*

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Balai Pelaksanaan Jalan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat diketahui bahwa Persentase kemantapan Jalan Nasional tahun 2019 sebesar 92,83 %, sementara kemantapan jalan Provinsi berada pada posisi 73,015 %. Hal ini mengindikasikan bahwa kemantapan jalan nasional lebih tinggi 19,815 % dibanding jalan Provinsi.

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Persentase Jalan Mantap Dengan standar Nasional

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI (2019)		DEVIASI
		PROVINSI (%)	NASIONAL (%)	
1.	Persentase jalan mantap	73,015	92,83	-19,815

3.3.1.5 *Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja Persentase Jalan Mantap*

Berdasarkan hasil survey IRMS yang telah dilakukan, ditemukan bahwa persentase kemantapan jalan provinsi pada Tahun 2019 sebesar 73,015% melebihi target awal tahun 2019 yaitu 73 % dengan persentase capaian 100.02 %. Demikian juga dengan jumlah ruas jalan yang terkoneksi jalan mantap dari target tahun 2019 sebesar 37 ruas, terealisasi sebanyak 40 ruas dengan persentase capaian 108,11%. Keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai target dalam Indikator Kinerja Utama ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengalokasian sejumlah anggaran untuk program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Pada Tahun 2019, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan memiliki pagu dana perubahan sebesar Rp **184.577.512.989,00** atau sebesar 38,52% dari total APBD-P Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sedangkan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mendapat porsi sebesar Rp. **48.377.347.200,00** atau sebesar 10,096%. Dengan keterbatasan dana yang tersedia, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan pembangunan dan peningkatan ruas jalan sesuai dengan kebutuhan atau standar jalan provinsi. Sehingga target 73% dapat tercapai.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki komitmen dalam mewujudkan infrastruktur jalan dan jembatan dengan kualitas terbaik. Hal ini

didukung dengan keberadaan UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan yang telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi sejak tanggal 15 Maret 2012.

3. Unit Layanan Gangguan yang siap 24 jam untuk mengatasi bencana alam serupa banjir/longsor yang tersebar di 18 Kabupaten/Kota.
4. Dibentuknya UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI yang berkantor di wilayah kerjanya masing-masing sehingga kondisi jalan yang dipelihara semakin lebih baik.
5. Adanya pengawasan dan kontrol langsung dari pimpinan.

Peningkatan kondisi kemantapan jalan ini memberikan pengaruh pada :

- Meningkatnya kecepatan kendaraan sehingga mempengaruhi waktu tempuh rata-rata (waktu perjalanan) menjadi lebih singkat.
- Menurunnya nilai biaya transportasi untuk pengguna jalan, yaitu nilai Biaya Operasi Kendaraan (BOK).
- Meningkatnya pelayanan jalan seperti kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan.

3.3.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Program/Kegiatan Penunjang)

Untuk mencapai Target Indikator Kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan, pastinya membutuhkan program dan kegiatan yang mendukung. Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran/Target Indikator Kinerja sudah sangat sesuai sehingga realisasi pelaksanaannya melebihi target dengan % capaian kemantapan jalan sebesar 100,02 % yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumbar Tahun 2019 dan % capaian jumlah Jumlah Ruas Jalan yang terkoneksi dengan Kondisi Jalan Mantap sebesar 108,11% yang merupakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk percepatan dan efisiensi yang dilakukan pada program pendukung pencapaian indikator ini antara lain :

1. Ketersediaan Anggaran Program Pendukung indikator ini. Program Utama ada 2 (dua) yaitu :
 - a. Program Pembangunan Jalan & Jembatan Provinsi sebesar 184.577.512.989,00.
 - b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan & Jembatan sebesar 48.377.347.200,00.
2. Pengembalian sisa anggaran kegiatan yang tidak dipakai pada perubahan yaitu Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi sebesar (1.392.685.011,00) / 0.75 %.
3. Pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaan kegiatan

3.3.1.7 *Realisasi Anggaran*

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.17 Program / Kegiatan Pendukung Capaian Persentase Kemantapan Jalan Provinsi

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
I	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI (PROGRAM UTAMA)	184.577.512.989,00		154.051.894.972,06	83,46
1	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Tapus - Muaro Sei.Lolo - Gelugur (P.101)	6.052.944.100,00	100	5.493.935.790,00	90,76
2	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman (P.075)	1.476.078.000,00	100	1.473.436.400,00	99,82
3	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palembang - Palupuh (Simp. Patai) (P.081)	3.182.085.200,00	100	3.181.122.933,00	99,97
4	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Kantor Camat - Berkat (P.104)	3.294.320.000,00	100	3.239.248.400,00	98,33
5	Penyiapan Lahan Untuk Infrastruktur Bidang ke PU an	19.858.130.489,00	50,98	10.122.707.298,06	50,98
6	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Guguk Cino Sawahlunto (Lapangan Segitiga) (P.038)	5.843.480.900,00	100	5.840.652.251,00	99,95
7	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp. Ganting Payo - Batas Tanah Datar - Sumani (P.092)	3.206.813.800,00	100	3.195.376.565,00	99,64
8	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025)	3.304.971.800,00	100	3.146.029.600,00	95,19

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
9	Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum	67.100.000,00	100	47.062.278,00	70,14
10	Pembangunan Jembatan Kuranji Kota Padang	16.119.397.500,00	100	16.096.201.100,00	99,86
11	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Matur - Palembang (P.080)	2.813.726.600,00	100	2.811.680.350,00	99,93
12	Perencanaan Pembangunan Jembatan Provinsi	1.732.064.300,00	100	1.731.407.171,00	99,96
13	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino (P.037)	2.724.506.100,00	100	2.721.977.271,00	99,91
14	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simancung - Tj.Ampalu (P. 007)	4.194.115.000,00	100	4.194.007.200,00	100,00
15	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Lubuk Basung - Sungai Limau (P.072)	2.569.784.200,00	100	2.567.011.842,00	99,89
16	Pembangunan Jembatan Batu Bala (P.086)	767.875.000,00	100	760.362.513,00	99,02
17	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palupuh - Pua gadih - Koto Tinggi (P.090)	3.236.976.000,00	100	3.234.884.137,00	99,94
18	Pembangunan Jembatan Lolong (P. 099)	16.124.400.000,00	100	6.607.886.950,00	40,98
19	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Padang Koto Gadang - Palembang (P.088)	2.599.915.600,00	100	2.582.079.769,00	99,31
20	Perencanaan Pembangunan Jalan Provinsi	4.271.605.300,00	100	4.268.121.483,00	99,92
21	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan (P.100)	486.194.700,00	100	484.031.300,00	99,56
22	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Jalan/Jembatan Provinsi	600.204.000,00	100	528.181.071,00	88,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
23	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073)	3.507.765.800,00	100	3.507.360.650,00	99,99
24	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. Koto Baru - Tj. Simalidu (P.011)	1.000.000.000,00	100	990.089.400,00	99,01
25	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Abai Sangir - Sei.Dareh (P.056.3)	3.243.899.000,00	100	3.226.378.350,00	99,46
26	Updating Database Jalan Provinsi	603.843.500,00	100	597.505.089,00	98,95
27	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Jl. Lingkar Selatan (Payakumbuh) (P.084)	2.717.927.500,00	100	2.703.775.569,00	99,48
28	Peningkatan/Pembangunan Jalan Provinsi DAK (Pendamping)	50.486.625.000,00	99,05	40.645.170.462,00	80,51
29	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. Padang Aro - Lubuk Malako (P.056.1)	884.912.200,00	100	873.593.800,00	98,72
30	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Surantih - Kayu Aro - Langgai (P.086)	3.326.330.700,00	100	3.326.210.500,00	100,00
31	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Duku - Sicincin (P.087)	6.292.471.900,00	100	6.275.246.006,00	99,73
32	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat	2.155.916.000,00	84,12	1.813.663.901,00	84,12
33	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pangkalan Koto Baru-Sialang-Gelugur (P.076)	2.744.185.000,00	100	2.683.409.155,00	97,79
34	Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah II	2.927.247.800,00	100	2.927.247.800,00	100,00
35	Survey Pekerjaan Mendesak dan Bencana Alam	159.700.000,00	100	154.840.618,00	96,96
II	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN (PROGRAM UTAMA)	48.377.347.200,00	100	47.955.031.970,60	99,13
1	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Rawang - Talawi	122.120.000,00	100	121.938.865,00	99,85

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
2	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palembang - Palupuh (Sp.Patai)	303.900.000,00	100	302.215.225,00	99,45
3	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Guguk Cino - Sawahlunto	761.400.000,00	100	760.746.214,00	99,91
4	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp.Koto Baru - Tj. Simalidu	414.260.000,00	100	413.434.390,00	99,80
5	Pengadaan Peralatan dan Bahan Jalan dan Jembatan	3.465.000.000,00	100	3.264.180.799,60	94,20
6	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Bungo Tanjung - Teluk Tapang - Bts. Sumut	58.580.000,00	100	58.245.130,00	99,43
7	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batas Kota Payakumbuh - Sitangkai	3.126.650.000,00	100	3.100.436.062,00	99,16
8	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simancung - Tj. Ampalu	273.760.000,00	100	272.673.593,00	99,60
9	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan	27.840.000,00	100	27.478.350,00	98,70
	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur	896.080.000,00	100	895.645.359,00	99,95
11	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Jln Lingkar Selatan (Payakumbuh)	551.290.000,00	100	549.913.431,00	99,75
12	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Padang Aro - Lubuk Malako	466.400.000,00	100	465.928.902,00	99,90
13	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palupuh - Puagadiah - Koto Tinggi	571.760.000,00	100	571.233.600,00	99,91
14	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batusangkar - Ombilin	429.150.000,00	100	426.517.603,00	99,39
15	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp.Koto Baru - Junction	2.841.760.000,00	100	2.838.933.016,00	99,90

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
16	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar	1.802.150.000,00	100	1.801.466.950,00	99,96
17	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Lubuk Basung - Sungai Limau	693.900.000,00	100	684.648.125,00	98,67
18	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Bts.Sitangkai - Tj. Ampalu	428.760.000,00	100	428.447.756,00	99,93
19	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Padang Sawah - Kumpulan	907.700.000,00	100	907.449.692,00	99,97
20	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Kubu Kerambil - Batusangkar	458.900.000,00	100	452.957.537,00	98,71
21	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Lubuk Malako - Abai Sangir	396.400.000,00	100	395.969.140,00	99,89
22	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Padang Koto Gadang - Palembang	744.600.000,00	100	742.419.100,00	99,71
23	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Singkarak - Aripan - Tj.Balit - Pdg Ganting	716.400.000,00	100	715.366.490,00	99,86
24	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Junction - Abai Siat	811.760.000,00	100	811.721.121,00	100,00
25	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Koto Mambang - Balingka	981.400.000,00	100	978.918.025,00	99,75
26	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sicincin - Kurai Taji	569.900.000,00	100	563.649.050,00	98,90
27	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sijunjung - Tn. Badantung	306.760.000,00	100	306.224.509,00	99,83
28	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Inderapura - Muara Sakai	182.500.000,00	100	182.003.950,00	99,73
29	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Panti - Simpang Empat	2.246.030.000,00	100	2.244.501.847,00	99,93

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
30	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Baso - Batusangkar	686.150.000,00	100	684.544.615,00	99,77
31	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Solok - Alahan Panjang	1.353.900.000,00	100	1.352.597.540,00	99,90
32	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp.Napar - Bukit Bual - Tj.Ampalu	329.260.000,00	100	328.782.391,00	99,85
33	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi	2.087.170.000,00	100	2.086.305.603,00	99,96
34	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pintu Angin - Lubuk Saiyo	73.560.000,00	100	73.457.980,00	99,86
35	Pemeliharaan Peralatan Jalan dan Jembatan	1.174.400.000,00	100	1.125.773.223,00	95,86
36	Pengendalian Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan/Jembatan Provinsi	180.244.000,00	100	176.220.688,00	97,77
37	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Baso - Piladang	349.900.000,00	100	347.363.454,00	99,28
38	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Duku (Ketaping) - Pariaman	685.340.000,00	100	683.453.100,00	99,72
39	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Tj.Ampalu - Sijunjung	466.760.000,00	100	466.187.434,00	99,88
40	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. SP II - Kantor Camat	218.800.000,00	100	217.162.237,00	99,25
41	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang IV - Sasak	495.280.000,00	100	494.720.194,00	99,89
42	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batusangkar - Guguk Cino	226.400.000,00	100	224.738.663,00	99,27
43	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Alahan Panjang - Kiliran Jao	667.650.000,00	100	666.980.510,00	99,90
44	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang	517.400.000,00	100	516.688.050,00	99,86

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
45	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Rao - Rokan (Bts.Riau)	1.245.200.000,00	100	1.244.358.951,00	99,93
46	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pangkalan - Koto Baru - Sialang - Gelugur	1.638.950.000,00	100	1.637.213.633,00	99,89
47	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp Ganting Payo - Batas Solok - Sumani	681.400.000,00	100	680.800.680,00	99,91
48	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan Propinsi Dan Bangunan Pelengkap Jalan	3.938.003.200,00	100	3.905.192.665,00	99,17
49	Penanganan Kritis dan Unit Layanan Gangguan Jalan dan Jembatan Provinsi (ULG)	1.052.800.000,00	100	1.013.600.666,00	96,28
50	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Matur - Palembang	488.900.000,00	100	486.358.500,00	99,48
51	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Teluk Bayur - Nipah - Purus	75.000.000,00	100	74.185.700,00	98,91
52	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp.Sikabau - Sp. Koto Baru	791.760.000,00	100	791.170.361,00	99,93
53	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Kantor Camat - Berkat	-		-	-
54	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Air Balam - Air Bangis	310.280.000,00	100	309.920.822,00	99,88
55	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Guguk Cino - Sitangkai	434.400.000,00	100	432.409.785,00	99,54
56	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Abai Sangir - Sungai Dareh	284.650.000,00	100	284.162.584,00	99,83
57	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Surantih - Kayu Aro - Langgai	1.763.900.000,00	100	1.763.429.750,00	99,97
58	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Talu - Lubuk - Sikaping	551.530.000,00	100	551.113.800,00	99,92
59	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Padang Karambia - Tj. Bungo	51.250.000,00	100	50.874.560,00	99,27

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN (PROGRAM PENUNJANG)	3.735.168.000,00		3.705.302.724,00	99,20
1	Pengadaan Alat-alat Ukur dan Laboratorium Ke Bina Margaan	3.180.450.000,00	100	3.160.861.922,00	99,38
2	Monitoring Pengendalian Mutu UPTD	416.966.000,00	100	409.354.756,00	98,17
3	Pemeliharaan Alat-Alat Ukur Laboratorium Ke Binamargaan	137.752.000,00	100	135.086.046,00	98,06

3.3.2 Capaian Kinerja Indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Tata Pemerintahan

3.3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Untuk persentase jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan, (%) capaian adalah perbandingan antara target dan realisasi yang secara matematis ditulis sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{3 \text{ unit}}{3 \text{ unit}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = 100 \%$$

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Tata Pemerintahan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	3 unit	3 unit	100 %

Dengan pencapaian target sebesar 100%, maka klasifikasi penilaian untuk persentase sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan provinsi adalah **Sangat Baik**.

3.3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian dengan Tahun Lalu

Perbandingan Realisasi kinerja dan capaian jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan pada tahun 2017, 2018 & 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Tata Pemerintahan tahun 2017, 2018 & 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (unit)			REALISASI (unit)			% CAPAIAN		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1.	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	8	8 (target RPJMD) 3 (target PK)	3 (target RPJMD) 3 (target PK)	7	3 (selesai & berfugsi)	3	87.5	37.5 100	100 100

Sumber data : LAKIP 2017, 2018

Pada tabel diatas perbandingan realisasi dan capaian mempedomani target pada Perjanjian Kinerja (PK). Dari tabel 3.19 diketahui bahwa persentase capaian jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan dari tahun 2017 mengalami

peningkatan ke tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2019 target dan realisasi berada pada posisi nilai sama dengan tahun 2018.

3.3.2.3 *Perbandingan Realisasi Kinerja s/d tahun 2019 terhadap Renstra*

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah (target akhir periode renstra) yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi 2019}}{\text{Target 2021}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{32 \text{ (akumulasi dari tahun sebelumnya)}}{54} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = 59,25 \%$$

Tabel 3.20 *Perbandingan Realisasi Kinerja s/d 2019 Terhadap Renstra*

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI s/d 2019	TARGET s/d 2021	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	3 unit (32 akumulasi dari tahun sebelumnya)	54 unit	59,25%

3.3.2.4 *Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Tata Pemerintahan*

Indikator ini merupakan salah satu indikator dengan klasifikasi sangat baik dimana Capaian Indikator Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja (PK) adalah sebesar 100%, demikian juga Capaian Indikator sesuai target Renstra pada tahun 2019 adalah 100%. Dalam keberhasilan pencapaian indikator ini ada beberapa hal yang telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat antara lain sebagai berikut :

- Pada Tahun 2019 dana yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator ini sebesar Rp 214.708.096.624,- atau sebesar 44,81% dari total pagu perubahan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dengan anggaran yang ada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus juga mengalokasikan sejumlah dana untuk pembangunan bangunan strategis lainnya yang sedang dalam progres pembangunan seperti Pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat (Tahap V), Pembangunan Gedung Kebudayaan Zona B (tahap 2), Gedung Kantor Samsat, Guest House Gubernur, Shelter Jabal Rahmah dan Shelter Linggarjati yang membutuhkan alokasi dana besar. Sehingga perlu dipilah prioritas bangunan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu sepanjang Tahun 2019.
- Pengawasan dan kontrol langsung dari pimpinan terkait penyelesaian pekerjaan

3.3.2.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Program/Kegiatan Penunjang)

Untuk mencapai Target Indikator Kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan, pastinya membutuhkan program dan kegiatan yang mendukung. Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran/Target Indikator Kinerja sudah sangat sesuai sehingga dalam pelaksanaannya tercapai 3 unit gedung pada tahun 2019, dengan persentase capaian 100%.

Untuk percepatan dan efisiensi yang dilakukan pada program pendukung pencapaian indikator ini antara lain :

1. Ketersediaan Anggaran Program Pendukung indikator ini.
2. Pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaan kegiatan

3.3.2.6 Realisasi Anggaran

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.21 Program / Kegiatan Pendukung Sarana dan Prasarana Penunjang Tata Pemerintahan

URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI FISIK %	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PBL DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	214,708,096,624.00		163,126,937,373.00	51,581,159,251.00	75.98
Lokarkarya, Sosialisasi, Forum Komunikasi dan Informasi Bangunan Gedung	826,831,050.00	100%	713,536,111.00	113,294,939.00	86.30
Pembangunan Gedung Inspektorat Provinsi Sumatera Barat	497,153,700.00	100%	411,454,960.00	85,698,740.00	82.76
Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat (Lanjutan)	30,487,863,000.00	100%	30,156,578,940.00	331,284,060.00	98.91
Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara	1,203,118,000.00	100%	1,197,808,600.00	5,309,400.00	99.56
Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di Sumatera Barat	206,144,000.00	100%	168,808,900.00	37,335,100.00	81.89
Pembangunan Gedung Kantor PPIPTEK Provinsi Sumatera Barat	496,790,250.00	100%	412,766,500.00	84,023,750.00	83.09
Pembangunan Gedung Utama Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat	113,244,500.00	100%	106,688,950.00	6,555,550.00	94.21
Pembinaan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)	628,613,200.00	100%	596,003,707.00	32,609,493.00	94.81
Pembangunan Gedung Convention Hall Sumatera Barat (Lanjutan)	1,581,482,530.00	100%	1,578,942,030.00	2,540,500.00	99.84
Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami di Musholla Jabal Rahmah di Painan (lanjutan)	500,000,000.00	100%	468,079,018.00	31,920,982.00	93.62
Assesmen Bangunan Gedung dan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung	555,563,750.00	51.38%	285,422,918.00	270,140,832.00	51.38

URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI FISIK %	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	%
Pembangunan Gedung Bundo Kandung Provinsi Sumatera Barat	4,373,619,500.00	100%	4,321,415,000.00	52,204,500.00	98.81
Pembangunan Lapangan Tenis Indoor Di Komplek Gubernur (lanjutan)	146,646,950.00	100%	113,762,160.00	32,884,790.00	77.58
Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami Linggarjati	3,926,518,700.00	100%	3,924,558,300.00	1,960,400.00	99.95
Pendampingan Pembinaan Pengelolaan Rumah Negara di Sumatera Barat	171,766,000.00	100%	160,316,433.00	11,449,567.00	93.33
Pembangunan Gedung Kantor Samsat Kota Padang	18,611,488,000.00	94.20%	16,696,589,950.00	1,914,898,050.00	89.71
Pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat (Lanjutan)	148,500,707,309.00	60.58%	100,018,727,639.00	48,481,979,670.00	67.35
Pembangunan Guest House Gubernur	976,156,000.00	100%	974,600,700.00	1,555,300.00	99.84
Pembangunan Taman Wisata Kelok Sembilan	405,547,000.00	100%	325,672,722.00	79,874,278.00	80.30
Penambahan Garase Rumah Dinas Gubernur	98,843,185.00	100%	98,665,685.00	177,500.00	99.82
Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100,000,000.00	100%	99,163,600.00	836,400.00	99.16
Dukungan Pelaksanaan MTQ Nasional	300,000,000.00	100%	297,374,550.00	2,625,450.00	99.12

3.3.3 Capaian Kinerja Indikator Persentase Cakupan Air Minum

3.3.3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Untuk persentase cakupan air minum, (%) capaian adalah perbandingan antara target dan realisasi yang secara matematis ditulis sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{78,65}{80,00} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = 98,31 \%$$

Tabel 3.22 Capaian Kinerja Indikator Persentase Cakupan Air Minum di Sumatera Barat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur layanan Dasar Masyarakat	Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	80%	78.65 %	98.31%

Dengan pencapaian atas target sebesar 98,31% tersebut maka klasifikasi penilaian untuk persentase Cakupan Air Minum di Sumatera Barat adalah **Sangat Baik**.

3.3.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian dengan Tahun Lalu

Perbandingan Realisasi kinerja dan capaian Persentase layanan air minum pada tahun 2017, 2018 & 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian Cakupan Layanan Air Minum tahun 2017,2018&2019

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1.	Persentase cakupan air minum	70	75	80	75,83	76,04	78,65	108,32	101,39	98,31

Sumber data : LAKIP 2017,2018

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi persentase (%) cakupan layanan air minum dari tahun 2017, 2018 dan 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi persentase (%) capaian mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

3.3.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d tahun 2019 terhadap Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah (target akhir periode renstra) yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi 2019}}{\text{Target 2021}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{78,65}{86,00} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = 91,45 \%$$

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d 2019 Terhadap Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI s/d 2019	TARGET 2021	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur layanan Dasar Masyarakat	Persentase cakupan air minum	78,65%	86 %	91,45%

Dari tabel diketahui bahwa capaian air minum s/d tahun 2019 adalah 91,45 dari target periode akhir Renstra.

3.3.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi capaian cakupan layanan air minum Provinsi jika dibandingkan dengan standar nasional ditampilkan pada tabel dibawah.

Tabel 3.20. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Persentase Cakupan Air Minum	Realisasi Provinsi Sumatera Barat	Standar Nasional
2016	72.32%	71.50%
2017	75.83%	72.04%
2018	76,04%	78%
2019	78,65%	78%
Target 2020	83%	85%
Target 2021	86%	85%

Sumber : RPJMN 2015-2019 (diolah) dan Randal (APBN)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Persentase cakupan air minum Nasional tahun 2019 sebesar 78,00 %, sementara cakupan air minum Provinsi berada pada posisi 78,65 %. Hal ini mengindikasikan bahwa cakupan air minum Nasional lebih rendah 0,65 % dibanding cakupan air minum Provinsi.

3.3.3.5 Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja Persentase Cakupan Air Minum

Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang bersumber dari PDAM dan Pamsimas, ditemukan bahwa persentase cakupan layanan air minum provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2019 sebesar 78,65%. Nilai tersebut lebih rendah dari target tahun 2019 yaitu 80 %. Kegiatan yang mendukung yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat sudah dilaksanakan secara baik, rata-rata mencapai target 100% dalam pelaksanaannya. Hanya ada satu kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan yaitu Pembangunan SPAM Kws Singgalang - Kota Pd. Panjang, Kab. Tanah Datar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Sumber air baku yang ada terdapat di kawasan hutan lindung dan sampai akhir tahun 2019 masih masih dalam proses pengurusan.
2. Masih terdapat jalur pipa distribusi yang lahannya belum bebas.

Disamping itu hambatan lain yang berasal dari kabupaten kota yang juga cukup berpengaruh dalam pencapaian target cakupan layanan air minum antara lain :

- Kurangnya komitmen kab/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat terutama terkait pendanaan kegiatan pendukung. Dimana masih kurangnya alokasi dana pada kegiatan tersebut.
- Keterbatasan ketersediaan sumber air baku di kabupaten/kota
- Di beberapa kab/kota masih terkendala pembebasan lahan.

3.3.3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Program/Kegiatan Penunjang)

Untuk mencapai Target Indikator Kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan, pastinya membutuhkan program dan kegiatan yang mendukung. Untuk percepatan dan efisiensi yang dilakukan pada program pendukung pencapaian indikator ini antara lain :

1. Ketersediaan Anggaran Program Pendukung indikator ini, yaitu Program Pengelolaan Dan Pengembangan Spam Lintas Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.638.277.400,-
2. Pengembalian sisa anggaran kegiatan yang tidak dipakai pada perubahan yaitu sebesar Rp. 2.240.531.600,00/57,76%, terutama untuk kegiatan yang batal dilaksanakan yaitu SPAM singgalang.
3. Pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaan kegiatan.

3.3.3.7 Realisasi Anggaran

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.24 Program/Kegiatan Pendukung Capaian Cakupan Air Minum

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
I	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SPAM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.638.277.400,00	100	1.478.956.569,00	90.28
1	Pembinaan Kegiatan PAMSIMAS di Provinsi Sumatera Barat	157,350,000.00	100	148,848,150.00	94.60
2	Pembangunan SPAM Regional Kab.Solok dan Kota Solok <i>(Penyusunan Dokumen FS)</i>	482,595,800.00	100	468,882,255.00	97.16
3	Pembangunan SPAM Regional Kab.Padang Pariaman dan Kota Pariaman <i>(Penyusunan Dokumen FS)</i>	486,872,600.00	100	477,408,480.00	98.06
4	Pembangunan SPAM Kws Singgalang - Kota Pd. Panjang, Kab.Tanah Datar	100,000,000.00	-	3,972,000.00	3.97
5	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Keciptakarya di Provinsi Sumatera Barat	311,459,000.00	100	280,535,284.00	90.07
6	Pengembangan SPAM Regional Kab. Agam - Bukittinggi (lanjutan) <i>(Penyusunan DED)</i>	100,000,000.00	100	99,310,400.00	99.31

3.3.4 Capaian Kinerja Indikator Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

3.3.4.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah (target akhir periode renstra) yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ cakupan sanitasi} = \frac{\text{jumlah \% akses sanitasi 19 kab/kota}}{19} \times 100\%$$

$$\% \text{ cakupan air minum} = 79,78 \%$$

Sebagaimana air minum, sanitasi juga merupakan salah satu indikator yang termuat dalam *Universal Access*. Pada Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat menargetkan capaian Persentase Rumah Tangga Bersanitasi sebesar 78 % dengan realisasi capaian sebesar 79,78 %.

Tabel 3.25 Target dan Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga Bersanitasi di Sumatera Barat Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI (%)	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur layanan Dasar Masyarakat	Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	78%	79,78%	102,28 %

Sumber data : Bidang Cipta Karya (Laporan Kemajuan Akses Jamban Provinsi Sumatera Barat)

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat capaian persentase Rumah tangga bersanitasi pada Tahun 2019 adalah sebesar 79,78%. Nilai ini melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu 78%. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Cipta Karya diketahui bahwa untuk mencapai target pemenuhan rumah tangga bersanitasi dilihat dari akses jamban yang datanya diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

3.3.4.2 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian dengan Tahun Lalu

Realisasi kinerja dan capaian Persentase Cakupan Sanitasi pada tahun 2017, 2018 & 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.26 Realisasi Kinerja & Capaian Persentase Sanitasi tahun 2017, 2018 & 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1.	Persentase cakupan sanitasi	73	75	78	75,88	75,19	79,78	103,94	100,25	102,28

Dari diatas diketahui bahwa realisasi persentase (%) Cakupan Layanan sanitasi dari tahun 2017, 2018 dan 2019 mencapai target yang ditetapkan. Realisasi tahun 2019 ini mengalami peningkatan dari tahun 2018. Demikan juga dengan persentase (%) capaian tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018.

3.3.4.3 *Perbandingan Realisasi Kinerja s/d tahun 2019 terhadap Renstra*

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah (target akhir periode renstra) yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi 2019}}{\text{Target 2021}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{79.78}{80} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = 99.72 \%$$

Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d 2019 Terhadap Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI s/d 2019	TARGET s/d 2021	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Persentase Cakupan Sanitasi	79.78 %	80 %	99.72%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa capaian rumah tangga bersanitasi sebesar 99,72 % dari target Akhir Periode Renstra (tahun 2021).

3.3.4.4 *Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Standar Nasional*

Perbandingan realisasi capaian cakupan layanan sanitasi Provinsi jika dibandingkan dengan standar nasional ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.28 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (tahun 2019)

NO	INDIKATOR KINERJA			DEVIASI
		PROVINSI (%)	STANDAR NASIONAL (%)	
1.	Persentase cakupan sanitasi	79,78	75,00	4,78

Tabel 3.29 Perbandingan antara Realisasi dengan Standar Nasional (dalam kurun RPJMN 2015-2019)

Persentase Sanitasi	Realisasi Provinsi Sumatera Barat	Standar Nasional
2017	75.88 %	71.44 %
2018	75,19 %	74,74 %

Persentase Sanitasi	Realisasi Provinsi Sumatera Barat	Standar Nasional
2019	79,78 %	75%
Target 2020	79 %	85%
Target 2021	80%	85%

Sumber : RPJMN 2015-2019 (diolah)

3.3.4.5 *Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja Persentase Rumah Tangga Bersanitasi*

Indikator ini merupakan salah satu indikator dengan klasifikasi sangat baik dimana Capaian Indikator Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja (PK) adalah sebesar 102,28 %. Dalam keberhasilan pencapaian indikator ini ada beberapa hal yang telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat antara lain sebagai berikut :

- Pada Tahun 2019 dana yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator ini sebesar **Rp 4.805.000.000,00** untuk Program Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi Dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebesar **Rp. 913.790.000,00** atau sebesar 1.19% dari total pagu perubahan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dengan anggaran yang ada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus juga mengalokasikan sejumlah dana untuk Pembangunan Drainase Kota Bukittinggi - Kab. Agam (lanjutan), Pembangunan Drainase Kab. Padang Pariaman, Pembangunan Drainase Kab. Solok dan Kota Solok, Pembangunan Drainase Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh, Pendampingan Program Sanimas IDB dan PPSP, Penyusunan Rencana Teknis Rinci (DED) Pengembangan TPA Sampah Regional Payakumbuh dan Studi Kelayakan Pengembangan/Pemindahan TPA Sampah Regional Payakumbuh dimana pekerjaan dikerjakan sepanjang Tahun 2019.
- Pengawasan dan kontrol langsung dari pimpinan terkait penyelesaian pekerjaan

3.3.4.6 *Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Program/Kegiatan Penunjang)*

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran/Target Indikator Kinerja cakupan sanitasi yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat sudah sangat sesuai. Rincian efisiensi sesuai indikator sasaran :

- Pengembalian sisa anggaran kegiatan yang tidak dipakai pada perubahan yaitu : Program Pengelolaan Sistem Drainase sebesar (145.000.000,00 /2,93%).
- Pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaan kegiatan.

3.3.4.7 *Realisasi Anggaran*

Untuk mencapai Target Indikator Kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan, pastinya membutuhkan program dan kegiatan yang mendukung. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja untuk persentase cakupan layanan sanitasi yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.30 Program/Kegiatan Pendukung Capaian Cakupan Sanitasi

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
I	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	913.790.000,00	100	801.506.936,00	87.71
1	Penyusunan Rencana Teknis Rinci (DED) Pengembangan TPA Sampah Regional Payakumbuh	242.550.000,00	100	227.090.850,00	93.63
2	Studi Kelayakan Pengembangan/Pemindahan TPA Sampah Regional Payakumbuh	224.898.000,00	100	205.028.783,00	91.17
3	Pendampingan Program Sanimas IDB dan PPSP	446.342.000,00	100	369.387.303,00	82.76
II	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE KEWENANGAN PROVINSI	4.805.000.000,00		4.744.636.685,00	98.74
1	Pembangunan Drainase Kota Bukittinggi - Kab. Agam (lanjutan)	100.000.000,00	100	97.839.800,00	97.84
2	Pembangunan Drainase Kab. Padang Pariaman	150.000.000,00	100	147.060.850,00	98.04
3	Pembangunan Drainase Kab. Solok dan Kota Solok	2.755.000.000,00	100	2.725.012.635,00	98.91
4	Pembangunan Drainase Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	1.800.000.000,00	100	1.774.723.400,00	98.60

3.3.5 Capaian Kinerja Indikator Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang

3.3.5.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Untuk persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang, (%) capaian adalah perbandingan antara target dan realisasi yang secara matematis ditulis sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{84}{83} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = 101,20 \%$$

Tabel 3.31 Capaian Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya RTR yang berkekuatan hukum	Jumlah RTR yang diperdakan	-		
2	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR	Jumlah program yang sesuai dengan rencana tata ruang	25	21	84%

Adapun tingkat kesesuaian program dimaksud, dapat kami jabarkan sebagai berikut :

1. Program pemantapan fungsi kota PKN yang dimaksud dalam RTRW adalah dalam rangka perwujudan pengembangan pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat yakni untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) perlu didukung oleh ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanannya. Sarana dan prasarana minimum yang harus dimiliki PKN adalah salah satunya pelabuhan laut internasional. Hal ini telah diakomodir dalam program pembangunan jangka menengah (RPJM) melalui program Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut pada Dinas Perhubungan selaku OPD penanggung jawab.
2. Program pemantapan fungsi kota PKW, sama halnya dengan PKN, maka untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Sumatera Barat, sarana prasarana minimum yang harus dimiliki salah satunya yaitu peningkatan kapasitas pelayanan air minum. Hal ini telah diakomodir dalam program pembangunan jangka menengah (RPJM) melalui program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku OPD penanggung jawab.
3. Program pengembangan dan penataan PKN, Sarana dan prasarana minimum yang harus dimiliki PKN adalah salah satunya terminal regional tipe A. Hal ini telah diakomodir dalam program pembangunan jangka menengah (RPJM) melalui

- program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku OPD penanggung jawab.
4. Program Pengembangan PKW dan PKWp, untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) di Provinsi Sumatera Barat, sarana prasarana minimum yang harus dimiliki salah satunya peningkatan pelayanan rumah sakit dan telah diakomodir dalam program pembangunan jangka menengah (RPJM) melalui Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD pada Dinas Kesehatan selaku OPD penanggung jawab.
 5. Program Pengembangan PKL, untuk Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) sarana prasarana minimum yang harus dimiliki tidak jauh berbeda dengan PKW yakni salah satunya peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan telah diakomodir dalam program pembangunan (RPJM) melalui program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku OPD penanggung jawab.
 6. Program Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi pada RTRW untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur transportasi guna mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pembangunan jalan dan jembatan Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku OPD penanggung jawab.
 7. Program Perwujudan Sistem Prasarana Sumberdaya Air dan Irigasi dalam RTRW untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan air dalam rangka ketahanan pangan serta meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi yang ada. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air selaku OPD penanggung jawab.
 8. Program Prasarana Perumahan dan Permukiman pada RTRW adalah rehabilitasi dan peningkatan pelayanan Instalasi Pengolahan Limbah dan telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku OPD penanggung jawab.
 9. Program Pengembangan Kawasan Hutan dalam RTRW berupa pengembangan hutan tanaman, pengembangan ekowisata. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Perencanaan dan Pengembangan Hutan pada Dinas Kehutanan selaku OPD penanggung jawab.

10. Program Pemantapan Kawasan Lindung dalam RTRW salah satunya berupa rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam pada Dinas Kehutanan.
11. Program Kawasan Rawan Bencana Alam dalam RTRW salah satunya berupa upaya untuk mengurangi/ meniadakan resiko bencana alam. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan pada BPBD.
12. Program pengembangan kawasan permukiman perkotaan dalam RTRW berupa percepatan penyediaan perumahan. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
13. Program Pengembangan Kawasan Pertanian pada RTRW berupa perluasan lahan dan peningkatan produktifitas lahan padi sawah. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Pertanian pada Dinas Pertanian.
14. Program Pengembangan Perkebunan pada RTRW berupa pengembangan kawasan tanaman tahunan/perkebunan. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Perkebunan pada Dinas Perkebunan.
15. Program Pengembangan Kawasan Peternakan pada RTRW berupa pengembangan kawasan agribisnis peternakan. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Peternakan pada Dinas Peternakan.
16. Program Pengembangan Perikanan dan Kelautan pada RTRW salah satunya berupa rehabilitasi dan konservasi sumberdaya pesisir dan laut. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Rehabilitasi, konservasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
17. Program Pengembangan Kawasan Pertambangan dalam RTRW salah satunya berupa inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas ESDM.
18. Program Pengembangan Industri dalam RTRW salah satunya berupa program pengembangan industri untuk kabupaten dan kota. Hal ini telah sesuai dengan

program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

19. Program Pengembangan Pariwisata dalam RTRW yaitu pengembangan kepariwisataan pada kawasan unggulan wisata maupun kawasan potensial wisata. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata pada Dinas Pariwisata.
20. Program Penyusunan RTR Kawasan Strategis merupakan program perwujudan kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Perencanaan penataan ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
21. Program Penyusunan Zoning Regulation Kawasan Strategis, merupakan program perwujudan kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel 3.32 Capaian Kinerja Indikator kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang	83	84	101,20 %

Dengan pencapaian target sebesar 101,20%, maka klasifikasi penilaian untuk persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang adalah **Sangat Baik**.

3.3.5.2 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian dengan Tahun Lalu

Perbandingan Realisasi kinerja dan capaian kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang pada tahun 2017, 2018 & 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang tahun 2017,2018&2019

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1.	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang	81	82	83	84	84	84	103,70	102,44	101,20

Sumber data : LAKIP 2017,2018

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang dari tahun 2017 s/d 2019 berada pada nilai yang sama yaitu 84%. Pada prinsipnya realisasi masih melebihi target, akan tetapi persentase capaian menurun dari tahun sebelumnya.

3.3.5.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d tahun 2019 terhadap Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah (target akhir periode renstra) yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi 2019}}{\text{Target 2021}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{84}{86} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = 97.67\%$$

Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d 2019 Terhadap Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI s/d 2019	TARGET s/d 2021	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang	84%	86%	97.67%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa capaian kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang sebesar 97.67 % dari target Akhir Periode Renstra (tahun 2021).

3.3.5.4 Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang

Dengan tercapainya target kesesuaian program antara rencana pembangunan, dalam hal ini kami mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRW), dapat disimpulkan bahwa dokumen perencanaan telah disusun dengan baik sesuai dengan arahan dari Bappenas yakni penyusunan dokumen perencanaan pembangunan harus terintegrasi dengan dokumen rencana tata ruang, sehingga terdapat sinkronisasi program diantara kedua dokumen perencanaan.

Adapun fungsi rencana tata ruang adalah sebagai kerangka pembangunan, dimana program pembangunan harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan.

Disamping itu, dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan pembangunan maupun dokumen rencana tata ruang dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) baik dari pihak perangkat daerah (OPD) selaku eksekutif dan DPRD selaku legislatif.

3.3.5.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Program/Kegiatan Penunjang)

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran/Target Indikator Kinerja kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat sudah sangat sesuai. Rincian efisiensi sesuai indikator sasaran :

- Pengembalian sisa anggaran kegiatan yang tidak dipakai pada perubahan yaitu pada program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang sebesar 140.480.000,00/43,48% dari pagu awal, terutama kegiatan yang dibatalkan yaitu Pengawasan Teknis SPM Bidang Penataan Ruang di Kabupaten/Kota.
- Pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaan kegiatan.

3.3.5.6 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai Target Indikator Kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan, pastinya membutuhkan program dan kegiatan yang mendukung. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja untuk persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.35 Program/Kegiatan Pendukung Capaian Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang

URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI FISIK %	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	%
PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG	4,733,380,000.00		4,090,939,998.00	642,440,002.00	86.43
Peningkatan Pemahaman Pemangku Kepentingan Terhadap Penataan Ruang	129,180,000.00	100%	92,222,400.00	36,957,600.00	71.39
Legalisasi RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Metropolitan PASOPALAPA	1,064,378,000.00	100%	784,969,750.00	279,408,250.00	73.75
Koordinasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kab/Kota (TKPRD) Provinsi Sumatera Barat	357,406,000.00	100%	315,982,278.00	41,423,722.00	88.41
Legalisasi RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mandeh Kab. Pesisir Selatan	597,616,000.00	100%	489,523,441.00	108,092,559.00	81.91
Penyusunan Database ke PU an dan Tata Ruang Provinsi / Kabupaten / Kota (lanjutan)	1,615,160,000.00	100%	1,500,950,893.00	114,209,107.00	92.93
Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Penataan Ruang	533,200,000.00	100%	483,756,588.00	49,443,412.00	90.73
Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	436,440,000.00	100%	423,534,648.00	12,905,352.00	97.04
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	182,620,000.00		146,956,724.00	35,663,276.00	80.47
Monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten / Kota	116,120,000.00	100%	103,811,062.00	12,308,938.00	89.40
Pengawasan Teknis SPM Bidang Penataan Ruang di Kabupaten/Kota	-		-	0.00	-
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat	66,500,000.00	100%	43,145,662.00	23,354,338.00	64.88

Tabel 3.36 Penilaian Kinerja Program/Kegiatan Dinas PUPR Tahun 2019

URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (%)	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
BELANJA DAERAH	511,223,330,608.00	426,717,677,771.66	84,505,652,836.34	83.47			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	32,036,807,519.00	31,617,025,707.00	419,781,812.00	98.69		100%	
BELANJA LANGSUNG	479,186,523,089.00	395,100,652,064.66	84,085,871,024.34	82.45		98.31%	
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5,495,289,048.00	5,444,171,352.00	51,117,696.00	99.07	sangat baik	100%	sangat baik
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,500,000.00	7,497,760.00	2,240.00	99.97	sangat baik	100%	sangat baik
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	1,722,649,000.00	1,711,864,324.00	10,784,676.00	99.37	sangat baik	100%	sangat baik
Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	2,071,303,848.00	2,047,960,291.00	23,343,557.00	98.87	sangat baik	100%	sangat baik
Penyediaan Alat Tulis Kantor	180,000,000.00	179,973,970.00	26,030.00	99.99	sangat baik	100%	sangat baik
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150,000,000.00	149,555,210.00	444,790.00	99.70	sangat baik	100%	sangat baik
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	30,000,000.00	29,934,297.00	65,703.00	99.78	sangat baik	100%	sangat baik
Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Per-UU	34,500,000.00	34,494,500.00	5,500.00	99.98	sangat baik	100%	sangat baik
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah	1,046,986,200.00	1,036,124,741.00	10,861,459.00	98.96	sangat baik	100%	sangat baik

URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (%)	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	252,350,000.00	246,766,259.00	5,583,741.00	97.79	sangat baik	100%	sangat baik
Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	-	-	0.00	-	<i>dihilangkan</i>		<i>dihilangkan</i>
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	6,619,374,100.00	6,507,910,789.00	111,463,311.00	98.32	sangat baik	100%	sangat baik
Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	392,202,800.00	386,818,100.00	5,384,700.00	98.63	sangat baik	100%	sangat baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1,700,000,000.00	1,676,146,798.00	23,853,202.00	98.60	sangat baik	100%	sangat baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	601,200,000.00	598,440,571.00	2,759,429.00	99.54	sangat baik	100%	sangat baik
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1,148,150,000.00	1,134,490,000.00	13,660,000.00	98.81	sangat baik	100%	sangat baik
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas/Mess	2,033,827,400.00	1,975,148,650.00	58,678,750.00	97.11	sangat baik	100%	sangat baik
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	675,993,900.00	669,409,170.00	6,584,730.00	99.03	sangat baik	100%	sangat baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	68,000,000.00	67,457,500.00	542,500.00	99.20	sangat baik	100%	sangat baik
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	275,352,800.00	271,272,000.00	4,080,800.00	98.52	sangat baik	100%	sangat baik
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	275,352,800.00	271,272,000.00	4,080,800.00	98.52	sangat baik	100%	sangat baik
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	264,800,000.00	254,909,897.00	9,890,103.00	96.27	sangat baik	100%	sangat baik

URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (%)	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	264,800,000.00	254,909,897.00	9,890,103.00	96.27	sangat baik	100%	sangat baik
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1,661,967,928.00	1,503,281,379.00	158,686,549.00	90.45	sangat baik	100%	sangat baik
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	270,806,000.00	234,089,105.00	36,716,895.00	86.44	sangat baik	100%	sangat baik
Penatausahaan Keuangan SKPD	999,260,000.00	925,317,742.00	73,942,258.00	92.60	sangat baik	100%	sangat baik
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	184,714,000.00	166,180,062.00	18,533,938.00	89.97	sangat baik	100%	sangat baik
Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	207,187,928.00	177,694,470.00	29,493,458.00	85.76	sangat baik	100%	sangat baik
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	184,577,512,989.00	154,051,894,972.06	30,525,618,016.94	83.46	Baik	97%	sangat baik
Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Tapus - Muaro Sei.Lolo - Gelugur (P.101)	6,052,944,100.00	5,493,935,790.00	559,008,310.00	90.76	sangat baik	100%	sangat baik
Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman (P.075)	1,476,078,000.00	1,473,436,400.00	2,641,600.00	99.82	sangat baik	100%	sangat baik
Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palembang - Palupuh (Simp. Patai) (P.081)	3,182,085,200.00	3,181,122,933.00	962,267.00	99.97	sangat baik	100%	sangat baik
Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Kantor Camat - Berkat (P.104)	3,294,320,000.00	3,239,248,400.00	55,071,600.00	98.33	sangat baik	100%	sangat baik

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (%)	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
Penyiapan Lahan Untuk Infrastruktur Bidang ke PU an	19,858,130,489.00	10,122,707,298.06	9,735,423,190.94	50.98	kurang	50.98%	kurang
Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Guguk Cino Sawahlunto (Lapangan Segitiga) (P.038)	5,843,480,900.00	5,840,652,251.00	2,828,649.00	99.95	sangat baik	100%	sangat baik
Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp. Ganting Payo - Batas Tanah Datar - Sumani (P.092)	3,206,813,800.00	3,195,376,565.00	11,437,235.00	99.64	sangat baik	100%	sangat baik
Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025)	3,304,971,800.00	3,146,029,600.00	158,942,200.00	95.19	sangat baik	100%	sangat baik
Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum	67,100,000.00	47,062,278.00	20,037,722.00	70.14	cukup	100%	sangat baik
Pembangunan Jembatan Kuranji Kota Padang	16,119,397,500.00	16,096,201,100.00	23,196,400.00	99.86	sangat baik	100%	sangat baik
Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Matur - Palembang (P.080)	2,813,726,600.00	2,811,680,350.00	2,046,250.00	99.93	sangat baik	100%	sangat baik
Perencanaan Pembangunan Jembatan Provinsi	1,732,064,300.00	1,731,407,171.00	657,129.00	99.96	sangat baik	100%	sangat baik
Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino (P.037)	2,724,506,100.00	2,721,977,271.00	2,528,829.00	99.91	sangat baik	100%	sangat baik
Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simancung - Tj.Ampalu (P. 007)	4,194,115,000.00	4,194,007,200.00	107,800.00	100.00	sangat baik	100%	sangat baik
Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan	2,569,784,200.00	2,567,011,842.00	2,772,358.00	99.89	sangat baik	100%	sangat baik

URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (%)	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
Lubuk Basung - Sungai Limau (P.072)							
Pembangunan Jembatan Batu Bala (P.086)	767,875,000.00	760,362,513.00	7,512,487.00	99.02	sangat baik	100%	sangat baik
Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palupuh - Pua gadih - Koto Tinggi (P.090)	3,236,976,000.00	3,234,884,137.00	2,091,863.00	99.94	sangat baik	100%	sangat baik
Pembangunan Jembatan Lolong (P. 099)	16,124,400,000.00	6,607,886,950.00	9,516,513,050.00	40.98	kurang	60.46%	cukup
Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Padang Koto Gadang - Palembang (P.088)	2,599,915,600.00	2,582,079,769.00	17,835,831.00	99.31	sangat baik	100%	sangat baik
Perencanaan Pembangunan Jalan Provinsi	4,271,605,300.00	4,268,121,483.00	3,483,817.00	99.92	sangat baik	100%	sangat baik
Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan (P.100)	486,194,700.00	484,031,300.00	2,163,400.00	99.56	sangat baik	100%	sangat baik
Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Jalan/Jembatan Provinsi	600,204,000.00	528,181,071.00	72,022,929.00	88.00	sangat baik	100%	sangat baik
Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073)	3,507,765,800.00	3,507,360,650.00	405,150.00	99.99	sangat baik	100%	sangat baik
Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. Koto Baru - Tj. Simalidu (P.011)	1,000,000,000.00	990,089,400.00	9,910,600.00	99.01	sangat baik	100%	sangat baik
Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Abai Sangir - Sei.Dareh (P.056.3)	3,243,899,000.00	3,226,378,350.00	17,520,650.00	99.46	sangat baik	100%	sangat baik

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (%)	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
Updating Database Jalan Provinsi	603,843,500.00	597,505,089.00	6,338,411.00	98.95	sangat baik	100%	sangat baik
Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Jl. Lingkar Selatan (Payakumbuh) (P.084)	2,717,927,500.00	2,703,775,569.00	14,151,931.00	99.48	sangat baik	100%	sangat baik
Peningkatan/Pembangunan Jalan Provinsi DAK (Pendamping)	50,486,625,000.00	40,645,170,462.00	9,841,454,538.00	80.51	baik	99.05%	sangat baik
Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. Padang Aro - Lubuk Malako (P.056.1)	884,912,200.00	873,593,800.00	11,318,400.00	98.72	sangat baik	100%	sangat baik
Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Surantih - Kayu Aro - Langgai (P.086)	3,326,330,700.00	3,326,210,500.00	120,200.00	100.00	sangat baik	100%	sangat baik
Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Duku - Sicincin (P.087)	6,292,471,900.00	6,275,246,006.00	17,225,894.00	99.73	sangat baik	100%	sangat baik
Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat	2,155,916,000.00	1,813,663,901.00	342,252,099.00	84.12	baik	84.12%	baik
Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pangkalan Koto Baru-Sialang-Gelugur (P.076)	2,744,185,000.00	2,683,409,155.00	60,775,845.00	97.79	sangat baik	100%	sangat baik
Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah II	2,927,247,800.00	2,927,247,800.00	0.00	100.00	sangat baik	100%	sangat baik
Survey Pekerjaan Mendesak dan Bencana Alam	159,700,000.00	154,840,618.00	4,859,382.00	96.96	sangat baik	100%	sangat baik
PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN	48,377,347,200.00	47,955,031,970.60	422,315,229.40	99.13	sangat baik	100%	sangat baik

URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (%)	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
DAN JEMBATAN							
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Rawang - Talawi	122,120,000.00	121,938,865.00	181,135.00	99.85	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palembang - Palupuh (Sp.Patai)	303,900,000.00	302,215,225.00	1,684,775.00	99.45	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Guguk Cino - Sawahlunto	761,400,000.00	760,746,214.00	653,786.00	99.91	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp.Koto Baru - Tj. Simalidu	414,260,000.00	413,434,390.00	825,610.00	99.80	sangat baik	100%	sangat baik
Pengadaan Peralatan dan Bahan Jalan dan Jembatan	3,465,000,000.00	3,264,180,799.60	200,819,200.40	94.20	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Bungo Tanjung - Teluk Tapang - Bts. Sumut	58,580,000.00	58,245,130.00	334,870.00	99.43	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batas Kota Payakumbuh - Sitangkai	3,126,650,000.00	3,100,436,062.00	26,213,938.00	99.16	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simancung - Tj. Ampalu	273,760,000.00	272,673,593.00	1,086,407.00	99.60	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan	27,840,000.00	27,478,350.00	361,650.00	98.70	sangat baik	100%	sangat baik

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (%)	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur	896,080,000.00	895,645,359.00	434,641.00	99.95	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Jln Lingkar Selatan (Payakumbuh)	551,290,000.00	549,913,431.00	1,376,569.00	99.75	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Padang Aro - Lubuk Malako	466,400,000.00	465,928,902.00	471,098.00	99.90	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palupuh - Puagadih - Koto Tinggi	571,760,000.00	571,233,600.00	526,400.00	99.91	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batusangkar - Ombilin	429,150,000.00	426,517,603.00	2,632,397.00	99.39	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp.Koto Baru - Junction	2,841,760,000.00	2,838,933,016.00	2,826,984.00	99.90	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar	1,802,150,000.00	1,801,466,950.00	683,050.00	99.96	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Lubuk Basung - Sungai Limau	693,900,000.00	684,648,125.00	9,251,875.00	98.67	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Bts.Sitangkai - Tj. Ampalu	428,760,000.00	428,447,756.00	312,244.00	99.93	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Padang	907,700,000.00	907,449,692.00	250,308.00	99.97	sangat baik	100%	sangat baik

URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (%)	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
Sawah - Kumpulan							
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Kubu Kerambil - Batusangkar	458,900,000.00	452,957,537.00	5,942,463.00	98.71	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Lubuk Malako - Abai Sangir	396,400,000.00	395,969,140.00	430,860.00	99.89	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Padang Koto Gadang - Palembang	744,600,000.00	742,419,100.00	2,180,900.00	99.71	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Singkarak - Aripian - Tj.Balit - Pdg Ganting	716,400,000.00	715,366,490.00	1,033,510.00	99.86	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Junction - Abai Siat	811,760,000.00	811,721,121.00	38,879.00	100.00	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Koto Mambang - Balingka	981,400,000.00	978,918,025.00	2,481,975.00	99.75	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sicincin - Kurai Taji	569,900,000.00	563,649,050.00	6,250,950.00	98.90	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sijunjung - Tn. Badantung	306,760,000.00	306,224,509.00	535,491.00	99.83	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Inderapura - Muara Sakai	182,500,000.00	182,003,950.00	496,050.00	99.73	sangat baik	100%	sangat baik

URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (%)	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Panti - Simpang Empat	2,246,030,000.00	2,244,501,847.00	1,528,153.00	99.93	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Baso - Batusangkar	686,150,000.00	684,544,615.00	1,605,385.00	99.77	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Solok - Alahan Panjang	1,353,900,000.00	1,352,597,540.00	1,302,460.00	99.90	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp.Napar - Bukit Bual - Tj.Ampalu	329,260,000.00	328,782,391.00	477,609.00	99.85	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi	2,087,170,000.00	2,086,305,603.00	864,397.00	99.96	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pintu Angin - Lubuk Saiyo	73,560,000.00	73,457,980.00	102,020.00	99.86	sangat baik	100%	sangat baik
Pemeliharaan Peralatan Jalan dan Jembatan	1,174,400,000.00	1,125,773,223.00	48,626,777.00	95.86	sangat baik	100%	sangat baik
Pengendalian Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan/Jembatan Provinsi	180,244,000.00	176,220,688.00	4,023,312.00	97.77	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Baso - Piladang	349,900,000.00	347,363,454.00	2,536,546.00	99.28	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Duku (Ketaping) - Pariaman	685,340,000.00	683,453,100.00	1,886,900.00	99.72	sangat baik	100%	sangat baik

URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (%)	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Tj.Ampalu - Sijunjung	466,760,000.00	466,187,434.00	572,566.00	99.88	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. SP II - Kantor Camat	218,800,000.00	217,162,237.00	1,637,763.00	99.25	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang IV - Sasak	495,280,000.00	494,720,194.00	559,806.00	99.89	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batusangkar - Guguk Cino	226,400,000.00	224,738,663.00	1,661,337.00	99.27	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Alahan Panjang - Kiliran Jao	667,650,000.00	666,980,510.00	669,490.00	99.90	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang	517,400,000.00	516,688,050.00	711,950.00	99.86	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Rao - Rokan (Bts.Riau)	1,245,200,000.00	1,244,358,951.00	841,049.00	99.93	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pangkalan - Koto Baru - Sialang - Gelugur	1,638,950,000.00	1,637,213,633.00	1,736,367.00	99.89	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp Ganting Payo - Batas Solok - Sumani	681,400,000.00	680,800,680.00	599,320.00	99.91	sangat baik	100%	sangat baik
Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan Propinsi Dan	3,938,003,200.00	3,905,192,665.00	32,810,535.00	99.17	sangat baik	100%	sangat baik

URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (%)	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
Bangunan Pelengkap Jalan							
Penanganan Kritis dan Unit Layanan Gangguan Jalan dan Jembatan Provinsi (ULG)	1,052,800,000.00	1,013,600,666.00	39,199,334.00	96.28	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Matur - Palembang	488,900,000.00	486,358,500.00	2,541,500.00	99.48	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Teluk Bayur - Nipah - Purus	75,000,000.00	74,185,700.00	814,300.00	98.91	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp.Sikabau - Sp. Koto Baru	791,760,000.00	791,170,361.00	589,639.00	99.93	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Kantor Camat - Berkat	-	-	0.00	-	<i>dihilangkan</i>		<i>dihilangkan</i>
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Air Balam - Air Bangis	310,280,000.00	309,920,822.00	359,178.00	99.88	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Guguk Cino - Sitangkai	434,400,000.00	432,409,785.00	1,990,215.00	99.54	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Abai Sangir - Sungai Dareh	284,650,000.00	284,162,584.00	487,416.00	99.83	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Surantih - Kayu Aro - Langgai	1,763,900,000.00	1,763,429,750.00	470,250.00	99.97	sangat baik	100%	sangat baik

URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (%)	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Talu - Lubuk - Sikaping	551,530,000.00	551,113,800.00	416,200.00	99.92	sangat baik	100%	sangat baik
Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Padang Karambia - Tj. Bungo	51,250,000.00	50,874,560.00	375,440.00	99.27	sangat baik	100%	sangat baik
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	3,735,168,000.00	3,705,302,724.00	29,865,276.00	99.20	sangat baik	100%	sangat baik
Pengadaan Alat-alat Ukur dan Laboratorium Ke Bina Margaan	3,180,450,000.00	3,160,861,922.00	19,588,078.00	99.38	sangat baik	100%	sangat baik
Monitoring Pengendalian Mutu UPTD	416,966,000.00	409,354,756.00	7,611,244.00	98.17	sangat baik	100%	sangat baik
Pemeliharaan Alat-Alat Ukur Laboratorium Ke Binamargaan	137,752,000.00	135,086,046.00	2,665,954.00	98.06	sangat baik	100%	sangat baik
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	913,790,000.00	801,506,936.00	112,283,064.00	87.71	sangat baik	100%	sangat baik
Penyusunan Rencana Teknis Rinci (DED) Pengembangan TPA Sampah Regional Payakumbuh	242,550,000.00	227,090,850.00	15,459,150.00	93.63	sangat baik	100%	sangat baik
Studi Kelayakan Pengembangan/Pemindahan TPA Sampah Regional Payakumbuh	224,898,000.00	205,028,783.00	19,869,217.00	91.17	sangat baik	100%	sangat baik
Pendampingan Program Sanimas IDB dan PPSP	446,342,000.00	369,387,303.00	76,954,697.00	82.76	Baik	100%	sangat baik

URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (%)	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PBL DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	214,708,096,624.00	163,126,937,373.00	51,581,159,251.00	75.98	Baik	96%	sangat baik
Lokarkarya, Sosialisasi, Forum Komunikasi dan Informasi Bangunan Gedung	826,831,050.00	713,536,111.00	113,294,939.00	86.30	sangat baik	100%	sangat baik
Pembangunan Gedung Inspektorat Provinsi Sumatera Barat	497,153,700.00	411,454,960.00	85,698,740.00	82.76	Baik	100%	sangat baik
Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat (Lanjutan)	30,487,863,000.00	30,156,578,940.00	331,284,060.00	98.91	sangat baik	100%	sangat baik
Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara	1,203,118,000.00	1,197,808,600.00	5,309,400.00	99.56	sangat baik	100%	sangat baik
Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di Sumatera Barat	206,144,000.00	168,808,900.00	37,335,100.00	81.89	Baik	100%	sangat baik
Pembangunan Gedung Kantor PPIPTEK Provinsi Sumatera Barat	496,790,250.00	412,766,500.00	84,023,750.00	83.09	Baik	100%	sangat baik
Pembangunan Gedung Utama Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat	113,244,500.00	106,688,950.00	6,555,550.00	94.21	Sangat baik	100%	sangat baik
Pembinaan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)	628,613,200.00	596,003,707.00	32,609,493.00	94.81	sangat baik	100%	sangat baik
Pembangunan Gedung Convention Hall Sumatera Barat	1,581,482,530.00	1,578,942,030.00	2,540,500.00	99.84	sangat baik	100%	sangat baik

URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (%)	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
(Lanjutan)							
Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami di Musholla Jabal Rahmah di Painan (lanjutan)	500,000,000.00	468,079,018.00	31,920,982.00	93.62	sangat baik	100%	sangat baik
Assesmen Bangunan Gedung dan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung	555,563,750.00	285,422,918.00	270,140,832.00	51.38	kurang	51.38%	kurang
Pembangunan Gedung Bundo Kandung Provinsi Sumatera Barat	4,373,619,500.00	4,321,415,000.00	52,204,500.00	98.81	sangat baik	100%	sangat baik
Pembangunan Lapangan Tenis Indoor Di Komplek Gubernuran (lanjutan)	146,646,950.00	113,762,160.00	32,884,790.00	77.58	Baik	100%	sangat baik
Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami Linggarjati	3,926,518,700.00	3,924,558,300.00	1,960,400.00	99.95	sangat baik	100%	sangat baik
Pendampingan Pembinaan Pengelolaan Rumah Negara di Sumatera Barat	171,766,000.00	160,316,433.00	11,449,567.00	93.33	sangat baik	100%	sangat baik
Pembangunan Gedung Kantor Samsat Kota Padang	18,611,488,000.00	16,696,589,950.00	1,914,898,050.00	89.71	sangat baik	94.20%	sangat baik
Pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat (Lanjutan)	148,500,707,309.00	100,018,727,639.00	48,481,979,670.00	67.35	cukup	60.58%	cukup
Pembangunan Guest House Gubernuran	976,156,000.00	974,600,700.00	1,555,300.00	99.84	sangat baik	100%	sangat baik
Pembangunan Taman Wisata Kelok Sembilan	405,547,000.00	325,672,722.00	79,874,278.00	80.30	Baik	100%	sangat baik
Penambahan Garase Rumah Dinas Gubernur	98,843,185.00	98,665,685.00	177,500.00	99.82	sangat baik	100%	sangat baik

URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (%)	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100,000,000.00	99,163,600.00	836,400.00	99.16	sangat baik	100%	sangat baik
Dukungan Pelaksanaan MTQ Nasional	300,000,000.00	297,374,550.00	2,625,450.00	99.12	sangat baik	100%	sangat baik
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	773,788,000.00	605,953,577.00	167,834,423.00	78.31	Baik	100%	sangat baik
Lokakarya, Sosialisasi dan Forum Komunikasi Jasa Konstruksi	274,180,000.00	222,363,100.00	51,816,900.00	81.10	Baik	100%	sangat baik
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sumatera Barat	75,000,000.00	-	75,000,000.00	-	<i>tidak terlaksana</i>	0%	<i>tidak terlaksana</i>
Bimbingan Teknis/Workshop Jasa Konstruksi	424,608,000.00	383,590,477.00	41,017,523.00	90.34	sangat baik	100%	sangat baik
PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG	4,733,380,000.00	4,090,939,998.00	642,440,002.00	86.43	sangat baik	100%	sangat baik
Peningkatan Pemahaman Pemangku Kepentingan Terhadap Penataan Ruang	129,180,000.00	92,222,400.00	36,957,600.00	71.39	Baik	100%	sangat baik
Legalisasi RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Metropolitan PASOPALAPA	1,064,378,000.00	784,969,750.00	279,408,250.00	73.75	Baik	100%	sangat baik
Koordinasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kab/Kota (TKPRD) Provinsi Sumatera Barat	357,406,000.00	315,982,278.00	41,423,722.00	88.41	Sangat baik	100%	sangat baik

URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (%)	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
Legalisasi RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mandeh Kab. Pesisir Selatan	597,616,000.00	489,523,441.00	108,092,559.00	81.91	Baik	100%	sangat baik
Penyusunan Database ke PU an dan Tata Ruang Provinsi / Kabupaten / Kota (lanjutan)	1,615,160,000.00	1,500,950,893.00	114,209,107.00	92.93	sangat baik	100%	sangat baik
Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Penataan Ruang	533,200,000.00	483,756,588.00	49,443,412.00	90.73	sangat baik	100%	sangat baik
Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	436,440,000.00	423,534,648.00	12,905,352.00	97.04	sangat baik	100%	sangat baik
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KEUANGAN DAERAH	424,759,000.00	410,989,119.00	13,769,881.00	96.76	sangat baik	100%	sangat baik
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi (UPT Balai Pengujian Konstruksi)	220,357,000.00	214,910,354.00	5,446,646.00	97.53	sangat baik	100%	sangat baik
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi (UPT Workshop dan Peralatan)	204,402,000.00	196,078,765.00	8,323,235.00	95.93	sangat baik	100%	sangat baik
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SPAM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,638,277,400.00	1,478,956,569.00	159,320,831.00	90.28	sangat baik	100%	sangat baik
Pembinaan Kegiatan PAMSIMAS di Provinsi Sumatera Barat	157,350,000.00	148,848,150.00	8,501,850.00	94.60	sangat baik	100%	sangat baik
Pembangunan SPAM Regional Kab.Solok dan Kota Solok	482,595,800.00	468,882,255.00	13,713,545.00	97.16	sangat baik	100%	sangat baik

URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (%)	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
Pembangunan SPAM Regional Kab.Padang Pariaman dan Kota Pariaman	486,872,600.00	477,408,480.00	9,464,120.00	98.06	sangat baik	100%	sangat baik
Pembangunan SPAM Kws Singgalang - Kota Pd. Panjang, Kab.Tanah Datar	100,000,000.00	3,972,000.00	96,028,000.00	3.97	kurang	100%	sangat baik
Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Keciptakarya di Provinsi Sumatera Barat	311,459,000.00	280,535,284.00	30,923,716.00	90.07	sangat baik	100%	sangat baik
Pengembangan SPAM Regional Kab. Agam - Bukittinggi (lanjutan)	100,000,000.00	99,310,400.00	689,600.00	99.31	sangat baik	100%	sangat baik
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE KEWENANGAN PROVINSI	4,805,000,000.00	4,744,636,685.00	60,363,315.00	98.74	sangat baik	100%	sangat baik
Pembangunan Drainase Kota Bukittinggi - Kab. Agam (lanjutan)	100,000,000.00	97,839,800.00	2,160,200.00	97.84	sangat baik	100%	sangat baik
Pembangunan Drainase Kab. Padang Pariaman	150,000,000.00	147,060,850.00	2,939,150.00	98.04	sangat baik	100%	sangat baik
Pembangunan Drainase Kab. Solok dan Kota Solok	2,755,000,000.00	2,725,012,635.00	29,987,365.00	98.91	sangat baik	100%	sangat baik
Pembangunan Drainase Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	1,800,000,000.00	1,774,723,400.00	25,276,600.00	98.60	sangat baik	100%	sangat baik
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	182,620,000.00	146,956,724.00	35,663,276.00	80.47	Baik	100	Sangat baik
Monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten /	116,120,000.00	103,811,062.00	12,308,938.00	89.40	sangat baik	100%	sangat baik

URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (%)	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
Kota							
Pengawasan Teknis SPM Bidang Penataan Ruang di Kabupaten/Kota	-	-	0.00	-	<i>dihilangkan</i>		<i>dihilangkan</i>
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat	66,500,000.00	43,145,662.00	23,354,338.00	64.88	cukup	100%	sangat baik

Tabel 3.37 Paket Lewat Tahun Anggaran 2019

N O	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	Penyedia Barang/ Jasa No kontrak, tgl	Nomor Addendum Tanggal Addendum Nilai Addendum (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	SISA PEMBAYARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Alasan di perpanjang
1	Pembangunan Gedung SAMSAT Kota Padang	19,974,631,000	PT. Hasmah Mat tujuh tujuh,	1 add.1/02/kpa-ck/pupr/VIII-2019. 2. 640/02-add.II/KPA-ck/PUPR/IX-2019 3. 640//02-add.III/KPA-ck/PUPR/XII-2019 4.640//02-add.IV/KPA-	18142280000/ 18142000000	1051971740/1 906724200	94.203	94.2	Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Lewat Tahun Anggaran dengan alasan keterlambatan tender, mobilisasi material terlambat dan kelalaian kontraktor dalam

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	Penyedia Barang/ Jasa No kontrak, tgl	Nomor Addendum Tanggal Addendum Nilai Addendum (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	SISA PEMBAYARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Alasan di perpanjang
				ck/PUPR/XII-2019 2 640/02-add.II/KPA- ck/PUPR/IX-2019 3 640/02-add.III/KPA- ck/PUPR/XII-2019 4.640//02-add.IV/KPA- ck/PUPR/XII-2019					memanagement waktu pelaksanaan kegiatan.
2	Pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat Tahap V	168,314,715,000	PT. Bangun Cipta Kontraktor, PT Brantas Abipraya Persero	1 640/01.add-I/KPA- CK/PUPR/X-2019 tgl 21 okt 2019 2 640/01.add-II/KPA- CK/PUPR/XII-2019, tgl 27 Desember 2019	140,192,004,619	55,267,872,838	60.58	60.58	Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Lewat Tahun Anggaran dengan alasan keterlambatan tender, lambatnya produksi atap space, mobilisasi material terganggu karena

N O	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	Penyedia Barang/ Jasa No kontrak, tgl	Nomor Addendum Tanggal Addendum Nilai Addendum (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	SISA PEMBAYARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Alasan di perpanjang
				3 640/01.add-III/KPA- CK/PUPR/XII-2019 tgl 31 Des 2019					ada konflik antara masyarakat dan kelalaian kontraktor dalam memagement waktu pelaksanaan kegiatan.
3	Pembangunan Jembatan Lolong	19,194,605,000	PT. Cahya Tunggal Abadi, 630/12/KTR-BM/2019, 28 Mei 2019	ADD-III/630/12/KTR-BM/2019 27 DESEMBER 2019 10,313,123,000.00	15,424,481,028.0	4.390.101.950	57.43	60.46	Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Lewat Tahun Anggaran dengan alasan keterlambatan tender, persoalan akses jalan ke lokasi , Jebolnya Cek Dam/Tanggul Pengaman Pekerjaan Jembatan Akibat Abrasi Sepanjang Pantai Padang Sehingga Akitifitas Terhenti ± 10 Hari Kalender, Pada abutment 1 (kec. padang barat) pelaksanaan pekerjaannya hanya dapat

N O	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	Penyedia Barang/ Jasa No kontrak, tgl	Nomor Addendum Tanggal Addendum Nilai Addendum (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	SISA PEMBAYARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Alasan di perpanjang
									dilakukan sampai jam 3 sore karena dilarang oleh masyarakat berdagang/lahan parkir dengan alasan mereka mencari makan, dan itu dgn syarat harus separoh-separoh digali & material pengganti sudah ditumpuk
4	Paket Pembangunan Jalan Bungo Tanjung-Teluk Tapang DAK Kab. Pasaman Barat	6,753,948,000	CV. ARG CAHAYA NUSANTARA, 620/138/KTR-BM/2019, 11 Juli 2019	ADD-I/620/138/KTR-BM/2019 17 JULI 2019 5,486,689,000	4,987,899,301	570.114.210	94.33	96.18	Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Lewat Tahun Anggaran dengan alasan cuaca dan akses ke lokasi curah hujan yang tinggi menyebabkan permukaan badan jalan menjadi licin sehingga kendaraan tidak bisa membawa material ke lokasi pekerjaan, hal itu juga

N O	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	Penyedia Barang/ Jasa No kontrak, tgl	Nomor Addendum Tanggal Addendum Nilai Addendum (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	SISA PEMBAYARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Alasan di perpanjang
									menyebabkan terjadinya keterlambatan pada penghamparan dan pemadatan material
5	Paket Pembangunan Jalan Tapus-Muara Sei Lolo-Gelugur	6,509,536,000	CV.INOCI, 620/72/KTR-BM/2019, 14 Juni 2019	ADD-I/620/72/KTR-BM/2019 17 JULI 2019 5,579,799,000	5,579,799,084	554.761.650	90.06	98.74	Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Lewat Tahun Anggaran dengan alasan cuaca, kelalaian kontraktor
6	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Jalan Simpang Padang Aro-Sei Dareh (1)	450,000,000	PT. TRI UNGGUL KONSULTAN, 620/162/KTR-PRC-BM/2019, 6 Agustus 2019	ADD-II/620/162/KTR-PRC-BM/2019 21 AGUSTUS 2019 444,235,000	447,040,000	117,722,275	73.50	73.50	Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Lewat Tahun Anggaran, dengan alasan jadwal tim tenis LH yg menyebabkan keterlambatan, sudah cek lapangan, tinggal rapat tim teknis dokling. Persetujuan KA Andal belum diterbitkan

N O	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	Penyedia Barang/ Jasa No kontrak, tgl	Nomor Addendum Tanggal Addendum Nilai Addendum (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	SISA PEMBAYARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Alasan di perpanjang
									oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi .
7	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Jalan Pangkalan Koto Baru Tapus (2)	500,000,000	PT. GEO ENVIRO ABADI, 620/165/KTR-PRC-BM/2019, 6 Agustus 2019	ADD-II/620/164/KTR-PRC-BM/2019 26 DESEMBER 2019 489,362,500	489,362,500	102,712,500	79.01	79.01	Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Lewat Tahun Anggaran , dengan alasan jadwal tim tenis LH yg menyebabkan keterlambatan, sudah cek lapangan, tinggal rapat tim teknis dokling. perbaikan KA Amdal belum diselesaikan dan belum diserahkan ke Komisi Penyusunan Amdal (KPA) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasaman, sehingga KA Andal belum disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup.
8	Penyusunan	250,000,000	CV. Nabel	ADD-II/620/202/KTR-PRC-	248,033,500	71,814,260	65.93	65.93	Pemberian Kesempatan

N O	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	Penyedia Barang/ Jasa No kontrak, tgl	Nomor Addendum Tanggal Addendum Nilai Addendum (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	SISA PEMBAYARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Alasan di perpanjang
	Dokumen Lingkungan Hidup Jalan Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi (3)		Engineering Consultant 620/176/KTR-PRC-BM/2019, 21 Agustus 2019	BM/2019, 26 DESEMBER 2019 210778260					Penyelesaian Pekerjaan Lewat Tahun Anggaran , dengan alasan jadwal tim tenis LH yg menyebabkan keterlambatan, sudah cek lapangan, tinggal rapat tim teknis dokling. Dokumen lingkungan yang diserahkan oleh Konsultan CV. Nabel Engineering Consultant, baru berupa draft/konsep. Dokumen ini dibahas & diperiksa oleh Dinas LH Provinsi terlebih dahulu, dan diberikan masukan, saran dan perbaikan, melalui rapat koordinasi dengan OPD terkait di Provinsi dan OPD Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Agam.

Tabel 3.38 Rekapitulasi Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PUPR Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	Tim evaluator
2	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Persentase Jalan Mantap	73%	73,015 %
	Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	3 unit	3 unit
		Persentase cakupan air minum	80%	78,65%
		Persentase cakupan sanitasi	78%	79,78%
3	Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi	83%	84%

BAB 4. PENUTUP

LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 merupakan cerminan capaian target kinerja dalam rangka menunjang tercapainya sasaran strategis pada tahun selanjutnya. LAKIP disusun berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan terhadap Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan sebelumnya. LAKIP ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan 16 (enam belas) program, meliputi: 11 (sebelas) program utama dan 5 (lima) program pendukung. Pada masing-masing program terdiri dari beberapa kegiatan.

Penilaian kinerja dilakukan terhadap program dan kegiatan berdasarkan realisasi fisik maupun keuangannya. Pada laporan ini, dilakukan pengukuran capaian kinerja secara kuantitatif dan dilanjutkan dengan analisis penilaian kinerja secara kuantitatif dengan terlebih dahulu menetapkan kriteria skala kualitatif sehingga dapat diketahui kinerja program/kegiatan secara kualitatif.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada LAKIP ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Total penyerapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2019 ini adalah sebesar 82,45 % (Rp. 395.100652.064.66-) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 479.186.523.089,-. Realisasi fisik sebesar 98.21%.
2. Dari 16 (enam belas) program yang ada pada tahun 2019, dari capaian kinerja fisik diketahui bahwa ke 16 (enam belas) program terlaksana dengan kinerja sangat baik. Sementara capaian kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat terhadap 16 (enam belas) program diketahui bahwa terdapat 12 (dua belas) program berkinerja sangat baik, 4 (empat) program berkinerja baik.

Penilaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 ini menjadi salah satu bahan untuk pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi sesuai Penetapan Kinerja yang ada. Kendala-kendala yang dihadapi pada tahun 2019 dapat dijadikan cermin untuk antisipasi pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan capaian keuangan diketahui bahwa kinerja Dinas PUPR berada pada prediket penilaian “**baik**”, sementara dari capaian realisasi fisik berada pada predikat “**sangat baik**”. Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mewujudkan capaian keuangan lebih baik di masa mendatang antara lain :

1. Mempersiapkan kelengkapan administrasi untuk persiapan Pengadaan Barang dan Jasa untuk semua paket pekerjaan terutama paket lelang agar pelaksanaan pekerjaan fisik bisa dilakukan lebih awal, sehingga tidak ada lagi paket pekerjaan yang dilaksanakan melewati Tahun Anggaran yang nantinya akan berefek pada rendahnya serapan keuangan seperti yang terjadi pada tahun 2019 ini.
2. Menempatkan SDM yang berkualitas sesuai dengan kompetensi bidangnya masing-masing sehingga kinerja pelaksanaan kegiatan memberikan hasil yang baik.
3. Meningkatkan monitoring dan pengawasan berlapis dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.